

**PERAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN REVITALISASI PUSAT  
KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA (PKOR) WAY HALIM**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**IGA AWALIA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### PERAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN REVITALISASI PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA (PKOR) WAY HALIM

Oleh:

Iga Awalia

Saat ini masyarakat cenderung menyampaikan aspirasi melalui media sosial karena jika secara langsung aspirasi terkadang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tidak sedikit masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui media sosial terkait PKOR Way Halim, sehingga perlu diketahui terkait peran masyarakat melalui media sosial dan implikasinya terhadap kebijakan revitalisasi PKOR Way Halim. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran masyarakat melalui media sosial dan kecenderungan aplikasi media sosial yang digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, untuk mengetahui relevansi dari aspirasi masyarakat di media sosial dan untuk mengetahui implikasi aspirasi masyarakat di media sosial terhadap kebijakan revitalisasi PKOR Way Halim. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di PKOR Way Halim. Informan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah (1) Masyarakat dinyatakan berperan dalam kebijakan revitalisasi PKOR Way Halim karena aspirasi masyarakat di media sosial memenuhi empat indikator peran serta masyarakat yaitu, sebagai kebijakan, sebagai strategi, sebagai alat komunikasi dan sebagai alat penyelesaian sengketa. Namun, tidak berperan sebagai terapi karena indikator peran masyarakat sebagai terapi tidak terpenuhi (2) Aspirasi masyarakat di media sosial sebelum revitalisasi cenderung menggunakan aplikasi *google+* dan saat revitalisasi menggunakan aplikasi *instagram* yang disampaikan oleh generasi *millenial* dan pihak swasta (3) Aspirasi masyarakat di media sosial sebelum revitalisasi berimplikasi pada keputusan merevitalisasi PKOR Way Halim, sedangkan aspirasi masyarakat saat revitalisasi berimplikasi pada pelaksanaan teknis dari revitalisasi PKOR Way Halim.

**Kata Kunci: PKOR Way Halim, Peran Masyarakat, Media Sosial, dan Kebijakan Revitalisasi**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF COMMUNITY IN SOCIAL MEDIA AND ITS IMPLICATION TOWARD THE REVITALIZATION POLICY OF PKOR WAY HALIM**

By:

Iga Awalia

Nowadays, the community tends to express their aspiration through social media because if it is directly spoken, they are sometimes not followed up by the government. There are many people expressing their aspirations through social media related to PKOR Way Halim, it is therefore needed to be known regarding the role of the community through social media and its implications for PKOR Way Halim's revitalization policy. The objective of this research is to identify the role of the community through social media and the tendency of social media applications used by the public in expressing their aspirations, to find out the relevance of community aspirations in social media and to find out the implications of community aspirations in social media for PKOR Way Halim revitalization policy. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The research locations were at PKOR Way Halim. Informants, namely government, community, and private sectors. The data were collected through interviews, observation, and documentation. The results of the study are (1) It is found out that the community plays its role in PKOR Way Halim revitalization policy since the aspirations of the community in social media has fulfilled the four indicators of community participation namely, as a policy, as a strategy, as a communication tool and as a dispute resolution medium. However, it does not play a role as a therapy because the community's role indicator as therapy is not fulfilled (2) Community aspirations in social media before revitalization tend to use the Google+ application and during the revitalization was delivered through Instagram conveyed by millennial generation and private parties (3) Public aspirations on social media prior to revitalization have implications for the decision to revitalize the Way Halim PKOR, while community aspirations during revitalization have implications for the technical implementation of the revitalization of PKOR Way Halim.

**Keywords: PKOR Way Halim, Role Of Community, Social Media, and Revitalization Policy**

**PERAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN REVITALISASI PUSAT  
KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA (PKOR) WAY HALIM**

**Oleh  
IGA AWALIA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

**Judul Skripsi** : **PERAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBJAKAN REVITALISASI PUSAT KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA (PKOR) WAY HALIM**

**Nama Mahasiswa** : **Iga Awalia**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1516021026

**Jurusan** : Ilmu Pemerintahan

**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

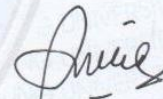
**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**



**Dr. Syarief Makhya, M.Si**

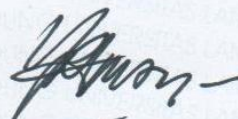
NIP. 19590803 198603 1 003



**Dr. Feni Rosalia, M.Si**

NIP. 1960219 199403 2 001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**



**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

NIP. 19611218 198902 1 001

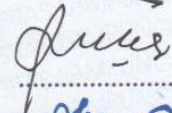
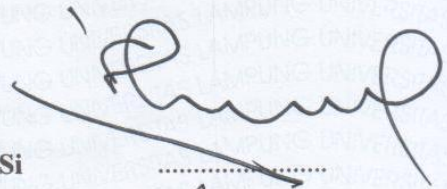
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Syarief Makhya, M.Si**

Sekretaris : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**

Penguji : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarief Makhya, M.Si.**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Agustus 2019

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2019  
Yang Membuat Pernyataan



Iga Awalia  
NPM. 1516021026

## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Iga Awalia, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Maret 1997. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Tatang Witarsa dan Ibu Umiyati.

Jenjang akademis penulis dimulai dari menyelesaikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Unila pada tahun 2003, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Swasta Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan penulis menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2015.

Selanjutnya di tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa Universitas Lampung, penulis aktif dalam organisasi dan pernah menjadi Kepala Bidang Humas UKM-U Bulutangkis Universitas Lampung periode 2017. Penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum UKM-U Bulutangkis Universitas Lampung periode 2018.



## **MOTTO**

“Laa Illaha Illa Anta, Subhanaka Inni Kuntu Minadz Dzalimiin.”  
(QS. Al-Anbiya’ 21:87)

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Semua berawal dari niat, karena niat akan berpengaruh pada sikap.”  
(Sandiaga Salahudin Uno)

“Kesuksesan harus diawali dari keyakinan pada diri sendiri.”  
(Iga Awalia)

“Jalani hidup seperti air mengalir, selalu mencari celah untuk melewati setiap  
hambatan.”  
(Iga Awalia)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah engkau ridhai yaa Allah langkah hambamu, sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta adikku yang ku sayangi sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Kepada seluruh keluarga besar dan sahabatku, terimakasih selalu memberikan dukungan, bantuan, motivasi, doa, dan perhatian.

Terima kasih untuk seluruh dosen, staff atau karyawan dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalaamiin, segala puji bagi Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Masyarakat Melalui Media Sosial dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keluarga bapak senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan nasihat, saran, masukan, motivasi dan pengertiannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keluarga ibu senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan.

5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP selaku penguji dan pembahas yang telah memberikan arahan, nasihat, motivasi, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keluarga bapak senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan.
6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang telah banyak membantu kelancaran administrasi dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Orang tuaku, Bapak Tatang dan Ibu Umiyati. Terima kasih telah sabar menunggu anaknya lulus, penelitian ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan, pengorbanan, dan kerja keras bapak dan ibu agar anaknya berpendidikan. Ribuan terima kasih yang peneliti ucapkan mungkin takkan mampu membayar letih kalian selama ini. Semoga ilmu yang didapat ini menjadi bekal penulis untuk membahagiakan bapak dan ibu di kemudian hari.
9. Adik ku, M. Agi Witarsa yang selalu memotivasi penulis agar cepat lulus dan bekerja, sehingga engkau bisa dapat sugu tambahan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita dan juga semoga dipermudah jalannya dalam mencapai semua apa yang telah diharapkan.

10. Adik ku, Nadya Rana Hanum adik sepupu yang sudah seperti adik sendiri, meskipun kita sering berantem, terima kasih telah menemani dan segala kenangan yang telah kita ukir bersama, suka duka yang kita rasakan, dan terima kasih sudah mendampingi selama penelitian ini dilakukan. Semoga kedepannya kita selalu akur dan diberi kemudahan dalam menggapai cita-cita.
11. Sahabat-sahabat kampusku Dara, Ellen, Aca dan Ikhsan. Terima kasih telah mewarnai perjalanan kuliah penulis, kebersamaan, dukungan, serta canda dan tawa kita di kantin uye dan wacana trip yang pernah kita lalui, takkan pernah bisa terganti dengan kenangan lainnya. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan dan tali silaturahmi tetap terjaga.
12. Sahabat-sahabatku di Osis Smalan *Crew*, Nana, Obi, Fiqri, Mutia, dan Intan serta sahabat SMA ku lainnya, Arum, Friska dan Refina yang selalu memberikan masukan positif dan pandangan agar mampu menjalani kehidupan dengan baik dan berbagai motivasinya seperti, “kapan wisuda, betah amat kuliah”. Semoga kita dipermudah dalam mencapai kesuksesan dan tali silaturahmi kita tetap terjaga.
13. Adik-adik grup Our Real Family (ORF), Nara, Epa, Pina, Heni, Destria, Ica, Nabilla, Hanu, dan Ayas, terima kasih sudah memberikan tawa suka ria saat peneliti penat dan selalu memotivasi dengan pertanyaan “kapan sempro, kapan semhas, kapan kompre dan aih kirain udah wisuda”. Semoga kedepan penulis masih boleh gabung main dan semoga perjalanan skripsi kalian dipermudah oleh Allah SWT.

14. Teman-teman seperjuangan di Ilmu Pemerintahan, Dila, Feygy, Uwo, Puput, Intan, Pascal, Yopi, Rahmat, Aviv, Untsa, Esa, Nurul, Bibil, Ica, Dian, Rizky serta teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas segala bantuannya selama perkuliahan, semoga langkah kita selalu diridhai oleh Allah SWT.
15. Teman-teman UKM-U Bulutangkis Unila, Fitri, Runny, Yayan, Fauzan, Irvan, Aji, Bagus, Derra, Andani, Nevi, Tebe serta teman-teman UKM U Bulutangkis Unila yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas kebersamaan dan pengalaman selama perkuliahan, semoga cita-cita kita tercapai.

Masih banyak lagi orang yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini maupun yang memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya para informan penelitian. Penulis mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2019

Penulis

Iga Awalia

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Tentang Peran .....	16
1. Konsep Peran.....	16
2. Macam Peranan.....	19
B. Komunikasi Pemerintah .....	20
C. Media Sosial.....	22
D. Perubahan Kebijakan .....	28
E. Implikasi.....	32
F. Kerangka Pikir.....	34
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Tipe Penelitian .....	37
B. Fokus Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Informan.....	40
E. Jenis Data .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik Pengolahan Data .....	45
H. Teknik Analisis Data .....	47
I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	48
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Masyarakat Provinsi Lampung .....	50
B. Kebijakan Revitalisasi .....	53

<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kategori Peran Masyarakat .....	62
1. Peran Masyarakat Sebagai Suatu Kebijakan.....	68
2. Peran Masyarakat Sebagai Strategi.....	74
3. Peran Masyarakat Sebagai Alat Komunikasi.....	78
4. Peran Masyarakat Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa.....	82
5. Peran Masyarakat Sebagai Terapi.....	87
B. Aspirasi Masyarakat Melalui Media Sosial .....	90
1. Pengguna Media Sosial .....	90
2. Kecendrungan Pengguna Media Sosial.....	97
3. Relevansi Substansi Aspirasi Masyarakat di Media Sosial..	101
C. Implikasi Aspirasi Masyarakat Melalui Media Sosial .....	103
1. Implikasi Aspirasi Masyarakat Sebelum Revitalisasi.....	103
2. Implikasi Aspirasi Masyarakat Saat Revitalisasi.....	109
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>116</b>
A. Simpulan .....	116
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1.	Penelitian Terdahulu.....	12
2.	Tahapan kebijakan.....	29
3.	Informan Penelitian.....	41
4.	Waktu Wawancara Informan .....	43
5.	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung .....	51
6.	Kelompok Umur Angkatan Kerja dan Tingkat Kelulusan .....	52
7.	Pendapatan Perkapita Provinsi Lampung.....	53
8.	Daftar Terkait Disfungsi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Melalui Media Sosial.....	63
9.	Daftar Dukungan dan Tuntutan Masyarakat Melalui Media Sosial Terhadap Kebijakan Revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga(PKOR) .....	65
10.	Triangulasi Peran Masyarakat Sebagai Suatu Kebijakan.....	73
11.	Triangulasi Peran Masyarakat Sebagai Strategi.....	77
12.	Triangulasi Peran Masyarakat Sebagai Alat Komunikasi.....	81
13.	Triangulasi Peran Masyarakat Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa.....	85
14.	Triangulasi Peran Masyarakat Sebagai Terapi.....	90
15.	Data Terkait Disfungsi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Melalui Media Sosial.....	106
16.	Data Dukungan dan Tuntutan Masyarakat Melalui Media Sosial Terhadap Kebijakan Revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga(PKOR) .....	109

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Presentase Pengguna Internet Berdasarkan Usia tahun 2017 ...	3
2. Presentase Pengguna Internet Berdasarkan Karakter Kota/Kabupaten tahun 2017.....	4
3. Presentase Media Sosial Paling Banyak di Akses di Indonesia tahun 2018.....	5
4. Salah satu bentuk aspirasi masyarakat terkait disfungsi PKOR Way Halim di media sosial.....	7
5. Salah satu bentuk aspirasi masyarakat terkait dukungan dan tuntutan terhadap revitalisasi PKOR Way Halim di media sosial.....	9
6. Perbedaan Struktur dan Komunikasi <i>Web 1.0</i> , <i>Web 2.0</i> dan <i>Web 3.0</i> .....	26
7. Perbandingan <i>Web 1.0</i> , <i>Web 2.0</i> dan <i>Web 3.0</i> .....	27
8. Model Perubahan Kebijakan Hogwood dan Peters.....	31
9. Kerangka Pikir.....	36
10. Peta Lokasi PKOR Way Halim.....	54
11. Konsep Zonasi PKOR Way Halim.....	58
12. Konsep Sirkulasi dan Tata Hijau PKOR Way Halim.....	58
13. Simulasi Penataan PKOR Way Halim.....	59
14. Akun Instagram @lampuung, @sscilampung dan @saibumi...	93
15. Aspirasi Masyarakat di Media Sosial @lampuung.....	93
16. Aspirasi Masyarakat di Media Sosial @sscilampung.....	94
17. Aspirasi Masyarakat di Media Sosial <i>website</i> saibumi.....	94
18. Pengguna Internet Berdasarkan Usia Tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018.....	96
19. Presentase Media Sosial Paling Banyak di Akses di Indonesia tahun 2014.....	98
20. Presentase Media Sosial Paling Banyak di Akses di Indonesia tahun 2015.....	99
21. Presentase Media Sosial Paling Banyak di Akses di Indonesia tahun 2016.....	99
22. Presentase Media Sosial Paling Banyak di Akses di Indonesia tahun 2017.....	100
23. Presentase Media Sosial Paling Banyak di Akses di Indonesia tahun 2018.....	100

24. Respon Pemerintah Atas Aspirasi Masyarakat di Media Sosial	114
--	-----

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Hak yang dimiliki masyarakat juga termasuk dalam memperoleh informasi dan menyampaikan informasi. Tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pemerintah dalam pelaksanaannya juga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Utomo (2013:60) menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi. Semestinya telah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membuka informasi dan memberikan kemudahan setiap warganya untuk mengakses informasi dan juga menyampaikan aspirasi mengenai penyelenggaraan pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan efektif apabila ada transparansi pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya. Utomo (2013:61) mengatakan untuk mendukung terwujudnya transparansi ini pemerintah perlu

mengembangkan keterlibatan publik dan harus responsif terhadap kebutuhan publik.

Kebutuhan publik mudah diketahui jika masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Aspirasi masyarakat dapat tersalurkan apabila komunikasi pemerintah berjalan dengan efektif, karena komunikasi pemerintahan merupakan dasar dalam membentuk relasi pemerintah dengan masyarakat. Hasan (2014:95) mendefinisikan komunikasi pemerintahan sebagai penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dalam hal ini pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu masyarakat dapat berada pada posisi sebaliknya.

Seiring dengan kemajuan teknologi, komunikasi pemerintahan yang konvensional harus disesuaikan menjadi komunikasi secara digital, tujuannya agar komunikasi pemerintah tetap berjalan efektif dan efisien dalam menyosialisasikan program-programnya, dapat menerima respon dan aspirasi langsung dari masyarakat serta dapat membangun kepercayaan publik. Paradigma baru komunikasi pemerintah yang mengedepankan inovasi, kreatif, responsif, kekinian, yang adaptif terhadap perkembangan era digital, merupakan jawaban terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik (*public trust*) terkait dengan kerja-kerja kementerian dan lembaga pemerintah.<sup>1</sup>

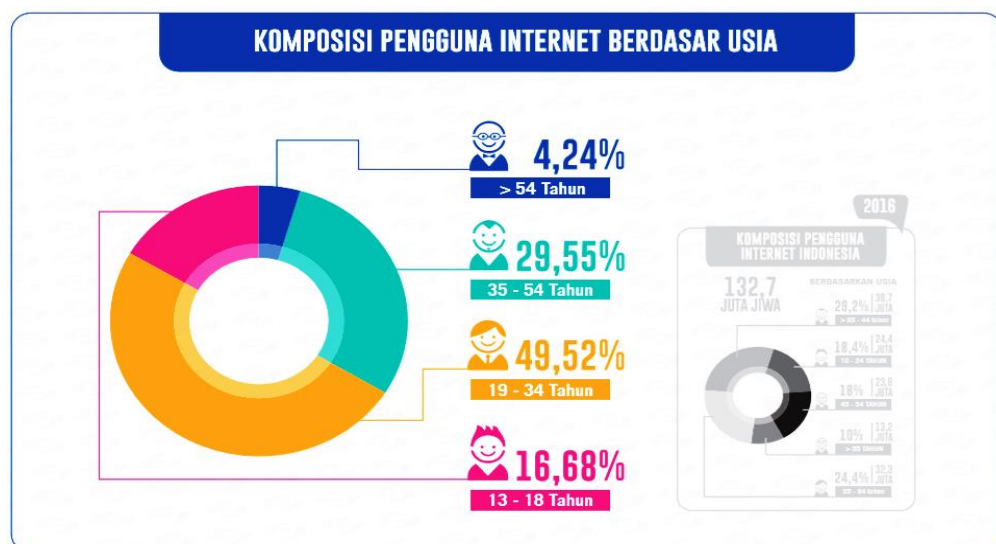
---

<sup>1</sup> Eddy Cahyono, "Paradigma Baru Komunikasi Pemerintahan", <http://setkab.go.id/paradigma-baru-komunikasi-pemerintah-di-era-digital/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 18:11 WIB

Proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat memerlukan media sebagai sarana yang membantu dalam menyampaikan pesan. Kehadiran media sosial saat ini merupakan kemajuan dari media massa yang mengadopsi teknologi digital. Utomo (2013:70) mengatakan:

“Telah banyak institusi pemerintah di sejumlah negara, terutama negara maju, menggunakan aplikasi *social media* dalam menjalankan fungsinya, termasuk menjadikannya sebagai media untuk memenuhi hak politik warga untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Media sosial dapat diakses apabila pengguna terhubung dengan internet. Internet hadir tidak hanya di kota-kota besar melainkan di seluruh tempat yang memiliki jaringan internet karena internet dapat dijangkau oleh semua kalangan tidak terbatas usia, ruang dan waktu. Berikut ini adalah persentase pengguna internet di Indonesia berdasarkan usia tahun 2017 oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) sebagai berikut:

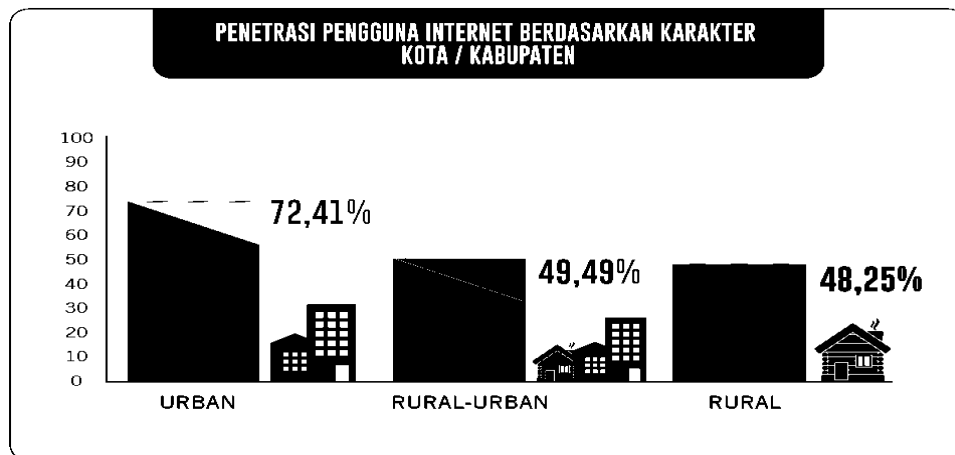


**Gambar 1. Persentase Pengguna Internet di Indonesia Berdasarkan Usia Tahun 2017<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/laporan%20survei%20APJII\\_2017\\_v1.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/laporan%20survei%20APJII_2017_v1.3.pdf) diakses pada tanggal 30 September 2018 pukul 13.40 WIB

Berdasarkan gambar 1.1 tentang Persentase Pengguna Internet Berdasarkan Usia Tahun 2017, usia 13-18 tahun sebesar 16,68%, usia 19-34 tahun sebesar 49,52%, usia 35-54 tahun sebesar 29,52%, dan usia lebih dari 54 tahun sebesar 4,24%. Berdasarkan hasil survey tersebut kisaran usia terbanyak pengguna internet di Indonesia berada pada usia 19-34 tahun sebesar 49,52%. Rentang usia tersebut termasuk ke dalam usia *millennial*, Absher dan Amidjaya (dalam Waidah, 2017:320) menyatakan generasi *millennial* lahirnya berkisar antara 1982-2002 (saat ini umur 17-37 tahun).

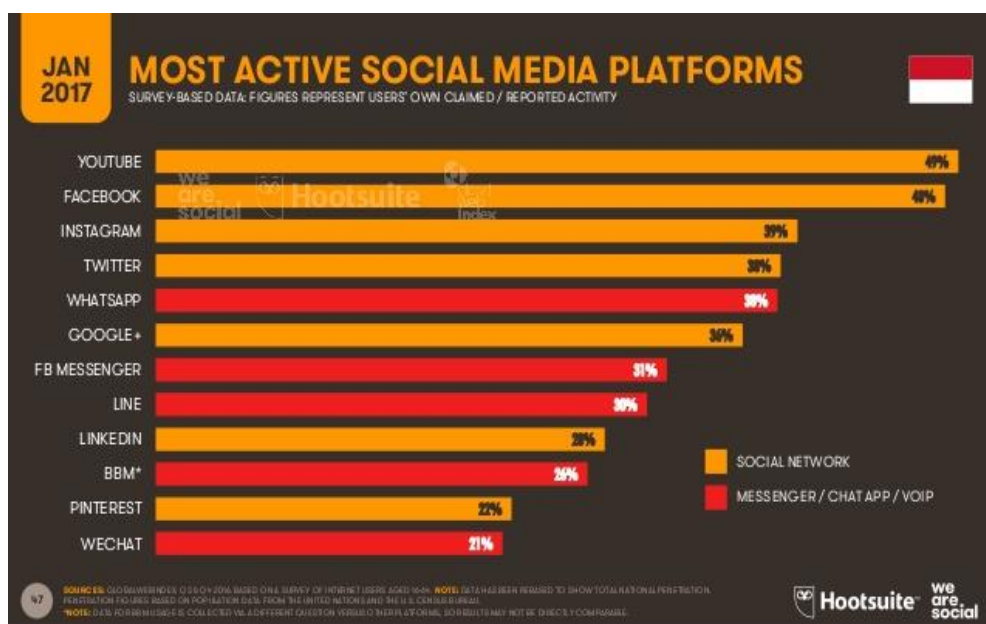
Generasi *millennial* menggunakan internet untuk mengakses informasi di media sosial. Pengguna internet tersebar di kota atau kabupaten di Indonesia. Berikut ini adalah persentase pengguna internet berdasarkan karakter kota atau kabupaten tahun 2017 oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) sebagai berikut:



**Gambar 2. Presentase Pengguna Internet Berdasarkan Karakter Kota atau Kabupaten Tahun 2017<sup>3</sup>**

<sup>3</sup> [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/laporan%20survei%20APJII\\_2017\\_v1.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/laporan%20survei%20APJII_2017_v1.3.pdf) diakses pada tanggal 30 September 2018 pukul 13.40 WIB

Berdasarkan gambar 1.2 tentang Presentase Pengguna Internet Berdasarkan Karakter Kota atau Kabupaten Tahun 2017, wilayah *urban* (kota) penetrasi sebesar 72,41%, wilayah *rural-urban* (daerah yang berada di antara kota dan desa) penetrasi sebesar 49,49% sedangkan di wilayah *rural* (desa) penetrasi sebesar 48,25%. Berdasarkan hasil survey tersebut bisa diperuntukan bahwa kisaran pengguna internet di Kota Bandar Lampung sebesar 72,41%. Internet diperlukan dalam mengakses media sosial. Berdasarkan data dari perusahaan media asal inggris yaitu *wearesocial* (dalam Heryanto, 2018:58), di tahun 2017 media sosial yang paling banyak di akses oleh masyarakat Indonesia sebagai berikut:



Sumber: Heryanto (2018:58)

### Gambar 3. Presentase Media Sosial Paling Banyak Diakses di Indonesia Tahun 2017

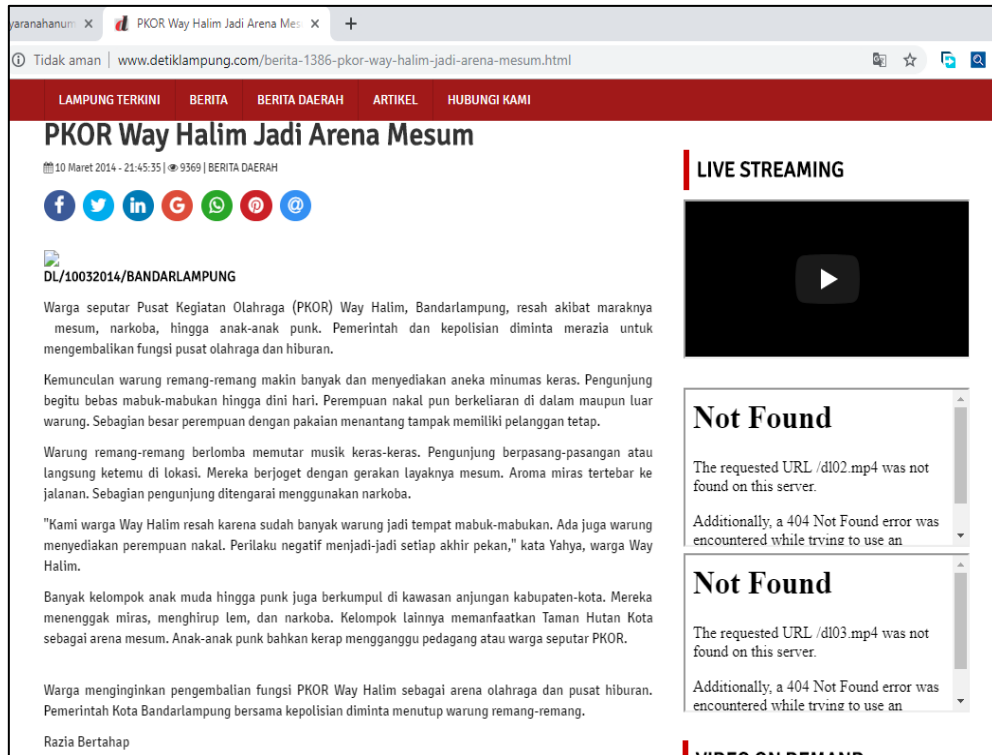
Berdasarkan gambar 1.3 tentang Presentase Media Sosial Paling Banyak Diakses di Indonesia Tahun 2017, media sosial kategori *social network* atau jejaring sosial, *Youtube* sebagai peringkat pertama dengan presentase 49%,



yang kedua *Facebook* dengan presentase 48%, yang ketiga *Instagram* dengan presentase 39%, yang keempat *Twitter* dengan presentase 38%, yang kelima *Google+* dengan presentase 36%, dan yang terakhir *Linkedin* dengan presentase 28%. Kategori *messenger/chat app/voip* atau aplikasi kirim pesan urutan pertama ialah *WhatsApp* dengan presentase 38%, yang kedua *Facebook Messenger* dengan presentase 31%, yang ketiga *Line* dengan presentase 30%, yang keempat *BBM* dengan presentase 26%, yang kelima *Pinterest* dengan presentase 22% dan yang terakhir *WeChat* dengan presentase 21%.

Penelitian ini memilih media sosial dalam kategori *social network* yang terdiri dari *instagram* dan *google+*, karena di aplikasi media sosial lainnya peneliti tidak menemukan aspirasi masyarakat terkait Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim. Kategori *social network* di *instagram* dan *google+* juga tercipta komunikasi dua arah yang memungkinkan pemerintah menyampaikan ide, program dan gagasan begitupun sebaliknya.

Salah satu aset Pemerintah Provinsi Lampung yang mendapat sorotan masyarakat di media sosial tersebut adalah Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim. Diketahui dari media sosial, masyarakat mengeluhkan PKOR Way Halim mengalami penurunan kualitas fisik dan dimanfaatkan juga untuk kegiatan komersil, sehingga PKOR Way Halim tidak berfungsi atau disfungsi dari tujuan awal pembangunannya sebagai pusat kebudayaan dan olahraga menjadi lokasi komersil dan sebagainya. Berikut ini salah satu aspirasi masyarakat terkait disfungsi PKOR Way Halim dari media sosial:



Sumber : Media sosial *google*

#### **Gambar 4. Salah satu bentuk aspirasi masyarakat terkait disfungsi PKOR Way Halim.**

Media sosial sebagai sarana berkomunikasi berperan penting dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat perihal disfungsi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim. Media sosial menyampaikan informasi berupa aspirasi masyarakat terkait disfungsi PKOR Way Halim, ada beberapa isi dari disfungsi PKOR Way Halim di media sosial baik fasilitas yang memprihatinkan, kekumuhan akibat pedagang, dan kegiatan komersil lainnya, meskipun terdapat juga beberapa dukungan atas adanya aktivitas-aktivitas tersebut di PKOR Way Halim dan menganggap PKOR Way Halim menjadi multifungsi karena aktivitas yang sangat beragam tersebut.

Tersampainya aspirasi masyarakat melalui media sosial ini merupakan bentuk kemajuan teknologi dari media massa, sehingga media sosial juga

memiliki fungsi yang sama dalam kebijakan. Kusumanegara (2010:55) menyatakan:

“Media massa merupakan aktor yang terlibat dalam semua tahap kebijakan karena berfungsi sebagai komunikator pemerintah dan masyarakat. Media massa mempunyai kekuatan yang khas, yaitu kemampuannya menjangkau *audiens* lebih luas dibanding kelompok manapun. Kekhasan itu menjadikan media massa merupakan agen yang efektif dalam membentuk opini publik. Selain itu, media massa juga berperan dalam agenda *setting*, mendiseminasikan kebijakan, maupun dalam *monitoring* implementasi kebijakan.”

Aspirasi masyarakat di media sosial tersebut menjadi sebuah isu yang mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Lampung. Setelah isu tersebut di agendakan, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan perubahan kebijakan di PKOR Way Halim dan menindaklanjutinya dengan merevitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR). Pemerintah Provinsi Lampung banyak menyerap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media sosial dan sekaligus menjadikannya sebagai sarana kontrol pembangunan di lapangan, seperti yang dikutip dari berita *online* Lampungpro.com menyatakan :

“Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, banyak menyerap aspirasi pembangunan dari media sosial. Informasi itu ditindaklanjuti dalam bentuk pembangunan.”<sup>4</sup>

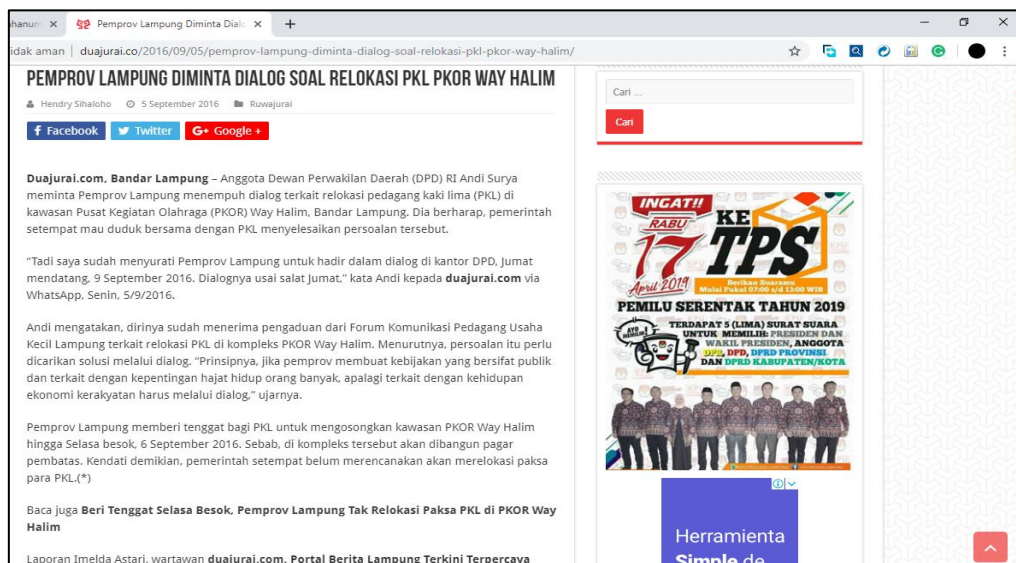
Peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui media sosial tersebut sudah menjadi kewajiban masyarakat sebagai upaya melakukan kontrol sosial dan kontrol pembangunan, karena informasi tersebut juga akan digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kusumanegara (2010:143) menyatakan pembuatan kebijakan

---

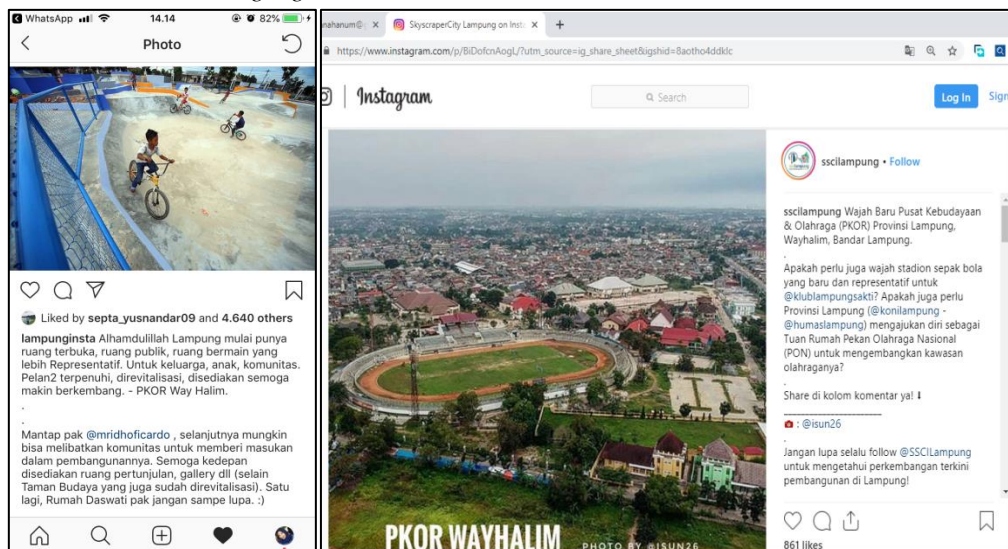
<sup>4</sup> Amirudin Sormin, “Gubernur Ridho Banyak Serap Aspirasi Masyarakat Lampung dari Medsos”, <https://lampungpro.com/post/8926/gubernur-ridho-banyak-serap-aspirasi-masyarakat-lampung-dari-medsos> diakses pada tanggal 11 September 2018 pukul 17:11 WIB

merupakan akibat dari perjuangan kekuasaan dari berbagai kelompok dimasyarakat dengan berbagai sumberdaya dan kepentingan.

Aspirasi masyarakat di media sosial masih terus mengalir saat revitalisasi PKOR Way Halim berlangsung, aspirasinya berupa dukungan dan tuntutan dari masyarakat. Salah satu dukungan dan tuntutan masyarakat melalui media sosial terkait revitalisasi PKOR Way Halim seperti berikut ini:



Sumber : Media sosial google



Sumber : Media sosial *instagram*.

**Gambar 5. Salah satu bentuk aspirasi masyarakat terkait tuntutan dan dukungan terhadap revitalisasi PKOR Way Halim.**

Revitalisasi PKOR Way Halim diawali dengan merelokasi pedagang kaki lima yang memadati bagian dalam kawasan PKOR Way Halim. Oleh karena itu, timbul dukungan dan tuntutan publik dalam proses revitalisasi, meskipun tuntutan lebih banyak dilayangkan saat proses revitalisasi, hal itu tidak menyurutkan langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam mencapai tujuannya. Pemerintah Provinsi Lampung juga tidak serta merta mengabaikan tuntutan dari masyarakat, alhasil setelah terlihat perubahan PKOR Way Halim jauh lebih baik, Pemerintah Provinsi Lampung mendapat dukungan dari masyarakat untuk terus melakukan perubahan pada PKOR Way Halim.

Tindakan pemerintah terkait merevitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim didorong oleh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Revitalisasi sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan. Peraturan tentang pedoman revitalisasi kawasan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengelolaan revitalisasi kawasan dan bertujuan mewujudkan kawasan yang berkualitas, memenuhi syarat, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan mendefinisikan bahwa revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way

Halim termasuk salah satu bentuk pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan yang telah diresmikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 10 Februari 2018, meskipun pembangunan masih terus dilanjutkan.

Perubahan kebijakan yang dilakukan pada PKOR Way Halim, yaitu dengan merevitalisasi PKOR Way Halim tidak hanya untuk mengembalikan fungsi PKOR Way Halim sebagaimana tujuan awal pembangunannya tetapi diperluas juga fungsinya sebagai ruang publik dan ruang terbuka hijau. Dimuat dari berita *online* detiklampung.co yaitu:

”Ridho berharap dengan adanya revitalisasi ini, dapat bermanfaat untuk masyarakat Lampung sebagai ruang publik sekaligus ruang terbuka hijau. “Dulu PKOR ini dibangun oleh Gubernur Lampung Pujono Pranyoto untuk kegiatan olahraga, namun seiring waktu diperluas fungsinya untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti MTQ Nasional, Lampung *Fair* dan Lain sebagainya,” kata Ridho.”<sup>5</sup>

Revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim oleh Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil menyelesaikan beberapa pembangunan. Revitalisasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung ini melakukan pembangunan meliputi: pembangunan masjid, sarana penerangan dan pembangunan gerbang PKOR, *jogging track*, taman bermain (*skate park*), ruang terbuka hijau (kolam gajah dan *food court*), rumah jaga 4 unit, dan MCK 9 unit. Selain itu ada juga, sarana transportasi dan papan informasi, serta pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan, *drainase* dan trotoar PKOR Wayhalim.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.detiklampung.com/berita-9160-ridho-revitalisasi-pkor-ini-semoga-bermanfaat.html> diakses pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 07:03 WIB

<sup>6</sup> <http://lampungprov.go.id/berita/gubernur-ridho-pkor-tumpuan-peningkatan-prestasi-para-atlet-di-lampung.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pada pukul 23:13 WIB

Berbagai aspirasi masyarakat melalui media sosial membuat pemerintah merevitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR), dukungan dan tuntutan masyarakat saat revitalisasi berlangsung juga dijadikan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai masukan dalam pembangunan PKOR Way Halim agar mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Rioferi Andrianto	2013	Pemerintah dan <i>Social Media</i> (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan <i>Social Media</i> sebagai Media Komunikasi oleh Humas Pemerintah Kabupaten Tabalong).	Fokus penelitian ini kepada kinerja humas pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menggunakan media sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan masukan dari masyarakat.
3.	Puguh Prasetya Utomo	2013	Website Sebagai Media Pemenuhan Hak Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.	Penelitian ini beranggapan melalui website terdapat transparansi dan partisipasi warga sehingga hak politik warga dalam penyelenggaraan pemerintahan terpenuhi.
4.	Nina Andriana	2013	Media Siber Sebagai Alternatif Jembatan Komunikasi Antara Rakyat Dan Pemimpinnya.	Fokus penelitian ini pada penggunaan media siber untuk menunjang demokrasi deliberatif.
6.	Said Lestalu	2015	Peran Media Cetak Dalam Mengawal Kebijakan Publik Di Kota Ambon.	Fokus penelitian ini pada peran pers dalam memberikan informasi dan kontrol pada kebijakan pemerintah.
7.	Yovinus	2018	Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung.	Fokus penelitian ini pada peran media sosial dalam optimalisasi pengawasan publik terutama terkait dengan kebijakan dan implementasi pembangunan.

Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1, Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yang pertama adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (2013) penelitian ini menganalisis cara pemerintah melakukan komunikasi melalui media sosial dan faktor – faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menjelaskan melalui media sosial akan tercipta komunikasi dua arah yang efektif oleh Humas Pemerintah Kabupaten Tabalong. Penelitian ini berfokus kepada kinerja humas pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menggunakan media sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan masukan dari masyarakat.

Penelitian kedua, merupakan jurnal yang ditulis oleh Puguh Prasetya Utomo (2013). Penelitian ini beranggapan melalui website terdapat transparansi dan partisipasi warga sehingga hak politik warga dalam penyelenggaraan pemerintahan terpenuhi.

Penelitian ketiga, merupakan jurnal yang ditulis oleh Andriana (2013), penelitian ini berfokus pada media siber yang merupakan ruang publik baru dan berpotensi mewujudkan demokrasi yang ideal. Fokus penelitian ini pada penggunaan media siber untuk menunjang demokrasi deliberatif.

Penelitian keempat, merupakan jurnal yang ditulis oleh Said Letaluhu (2015) penelitian ini berfokus pada peran pers dalam memberikan informasi dan kontrol pada kebijakan pemerintah. Penelitian kelima, merupakan jurnal yang ditulis oleh Yovinus (2018) penelitian ini berfokus ini pada peran media sosial dalam optimalisasi pengawasan publik terutama terkait dengan kebijakan dan implementasi pembangunan.



Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, ternyata beberapa daerah di Indonesia telah melakukan penelitian terkait penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, belum ada penelitian terkait peran masyarakat di media sosial dalam sebuah kebijakan sehingga penelitian di Provinsi Lampung terkait peran masyarakat melalui media sosial dan implikasinya terhadap kebijakan revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim tersebut menjadi penting untuk dilakukan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Masyarakat Melalui Media Sosial dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peran masyarakat melalui media sosial, relevansi konten aspirasi masyarakat di media sosial dan implikasinya terhadap kebijakan revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran masyarakat melalui media sosial dan kecenderungan aplikasi media sosial yang digunakan masyarakat dalam

menyampaikan aspirasinya terkait Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim.

2. Untuk mengetahui relevansi dari konten/isi aspirasi masyarakat di media sosial terhadap kebijakan revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim.
3. Untuk mengetahui implikasi dari aspirasi masyarakat di media sosial terhadap kebijakan revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam lingkup kebijakan publik.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Lampung atau bagi pembuat kebijakan (*stakeholder*) untuk pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan revitalisasi di Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media sosial dan meningkatkan pengelolaan serta pengawasan agar fasilitas yang telah dibangun dapat bertahan lama dan para pengunjung merasa nyaman. Diharapkan juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk ikut serta memelihara fasilitas yang ada.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Peran

#### 1. Konsep Peran

Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan. Struktur lapisan masyarakat menggambarkan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki perannya masing-masing. Peran bisa juga dikatakan sebagai kedudukan yang dapat menentukan apa yang harus diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Soekanto (2017:210) menyatakan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.

Peranan diperlukan untuk menentukan apa yang diperbuatnya serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat. Soekanto (2017:211) menjelaskan bahwa peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan peran. Sihabudin (2017:100) mengemukakan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya di masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, peran adalah suatu tindakan yang berlandaskan hak, kewajiban dan fungsinya dengan dibatasi oleh norma yang berlaku dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Soekanto (2017:211) menjelaskan peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran masyarakat diperlukan dalam proses lahirnya kebijakan. Waluyo (dalam Sabardi, 2014:73) mengatakan peran masyarakat yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa.

Masyarakat sebaiknya memberikan informasi kepada pemerintah dengan menyampaikan aspirasinya agar melahirkan kebijakan yang aspiratif. Waluyo (dalam Sabardi, 2014:73) merinci kategori peran serta masyarakat sebagai berikut:

- a. Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan.
- b. Peran serta masyarakat sebagai strategi.

- c. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi.
- d. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa.
- e. Peran serta masyarakat sebagai terapi.
- f. Peran serta masyarakat dan penegakan hukum lingkungan.

Penelitian ini hanya menggunakan point a sampai e pada konsep tersebut, karena dirasa tepat digunakan pada penelitian ini yang mengkaji peran masyarakat di media sosial dan implikasi terhadap kebijakan revitalisasi di PKOR Way Halim. Kategori peran masyarakat menurut Waluyo (dalam Sabardi, 2014:73) sebagai berikut:

- a) Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan.

Paham ini dilandasi suatu pemahaman bahwa peran serta masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (*right to be consulted*).

- b) Peran serta masyarakat sebagai strategi.

Paham ini beranggapan peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*), karena bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

- c) Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi.

Peran serta masyarakat didayagunakan untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini

dilandasi bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

d) Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa.

Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*misstrust*) dan kerancuan (*biasess*).

e) Peran serta masyarakat sebagai terapi.

Peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

## 2. Macam Peranan

Peranan memiliki beberapa macam bentuk. Soekanto (2017:213) mengatakan aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melakukannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat

karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakannya peranannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

## **B. Komunikasi Pemerintahan**

Komunikasi pemerintahan merupakan penggabungan dari dua kajian teoritis yang berbeda. Hasan (2014:95) mendefinisikan komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, namun di suasana tertentu bisa sebaliknya dimana masyarakat sebagai penyampai gagasan dan pemerintah mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Kondisi seperti itu pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mempertimbangkan dan merespon keinginan-keinginan masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Robbins (dalam Hasan, 2014:23) mengatakan fungsi utama komunikasi dalam organisasi atau kelompok tertentu adalah:

1. Fungsi Pengawasan
2. Fungsi Motivasi
3. Fungsi Pengungkapan Emosional
4. Fungsi Informasi

Fungsi organisasi pemerintahan harus disertai dengan pemberdayaan (*empowering*) sebagai upaya melaksanakannya. Respon penerima pesan diketahui dari proses umpan balik (*feedback*) yang hanya akan terjadi jika

komunikasi yang dilakukan dua arah baik ke atas dan ke bawah. Hasan (2014:39) menjelaskan komunikasi ke atas berarti komunikasi yang berjalan pada satu tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi, sedangkan komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang dilakukan ke tingkat dibawahnya dalam suatu organisasi sebagai cara pemerintah untuk menginformasikan dan menyosialisasikan kebijakan.

Komunikasi pemerintahan memiliki beberapa karakteristik. Robbins (dalam Hasan, 2014:117) menyebutkan terdapat enam karakteristik komunikasi dalam organisasi termasuk penyelenggaraan pemerintahan yaitu :

1. Para aparatur pemerintah harus menyadari pentingnya komunikasi.
2. Para aparatur pemerintah harus memiliki komitmen pada komunikasi dua arah.
3. Penekanan komunikasi lebih diutamakan pada bentuk komunikasi tatap muka.
4. Transparansi dan keterbukaan harus merupakan tujuan bersama dalam mencapai visi, misi, program dan strategi.
5. Kepiawaian dalam menangani kondisi seburuk apapun termasuk berita yang jelek dan tidak menguntungkan.
6. Memperlakukan komunikasi sebagai proses berkelanjutan.

Keberhasilan aparatur pemerintahan tidak terlepas dari kepiawaian aparatur dalam berkomunikasi. Hasan (2014:122) menjelaskan komunikasi dalam pemerintahan memegang peranan yang penting yaitu :



1. Dalam fungsi perintah, komunikasi memperbolehkan bawahan membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah; dalam hal ini didukung oleh pengarahan dan umpan balik yang bertujuan mempengaruhi aparatur lainnya sehingga berperilaku sama.
2. Dalam fungsi relasi, komunikasi memperbolehkan aparatur pemerintah lainnya untuk menciptakan dan mempertahankan kualitas dan prestasi serta hubungan personal dengan pegawai lainnya; hubungan pekerjaan akan berpengaruh pada kinerja lainnya.
3. Dalam fungsi manajemen ambigu, komunikasi merupakan alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan (*ambiguity*) dalam organisasi.

Proses komunikasi dalam masyarakat secara luas diperlukan kepiawaian dalam menyampaikan pesan. Ngilimun (2017:43) mengatakan pada tingkatan komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat luas. Bentuk komunikasinya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: secara langsung ataupun dengan komunikasi massa atau komunikasi yang melalui media massa.

### **C. Media Sosial**

Media merupakan saluran yang digunakan dalam proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, pesan yang ditujukan kepada publik melalui media massa dapat diterima publik secara serentak. Meyworitz (dalam Nasrullah, 2017:4) mendefinisikan media adalah saluran (*medium as vessel/conduit*), media adalah bahasa (*medium as language*), dan medium sebagai lingkungan (*medium as environment*). Pendapat tersebut memberi pandangan bahwa media bisa dilihat dari berbagai aspek, media bisa

mengandung nilai-nilai yang tidak sekedar sarana dalam penyampaian pesan.

Ngalimun (2017:95) mengatakan fungsi media massa adalah:

1. Sebagai saluran informasi.

Memberikan informasi bagi pembaca atau pendengarnya.

2. Sebagai saluran persuasi.

Dapat mempengaruhi pembaca atau pendengarnya agar melakukan tindakan sesuai dengan yang diharapkan penulisnya.

3. Sebagai saluran pembentuk atau mengembangkan pendapat umum.

Melalui media dapat membentuk dan mengembangkan pendapat publik.

4. Sebagai saluran kontrol sosial.

Media aktif dalam mengawasi, menjaga dan melakukan penyelidikan terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga lain yang melaksanakan fungsi pelayanan publik.

5. Sebagai lembaga ekonomi.

Media dikelola untuk meraup keuntungan.

Media massa dikelompokkan dalam beberapa kriteria. Nasrullah (2017:3) mengatakan media massa dibagi dalam beberapa kriteria teknologinya, yaitu: media lama dan media baru. Media lama seperti media cetak dan media elektronik, sedangkan media baru yang menggunakan internet adalah media sosial. Giantika (2019:3) menyatakan media sosial adalah media *online* dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Drakel (2018:2) menyebutkan media sosial yang berkembang dan digemari saat ini

yaitu *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram* dan *Google.com*. Nasrullah (2017:16) menyebutkan ada beberapa karakteristik media sosial yaitu :

1. Jaringan (*Network*)
2. Informasi (*Information*)
3. Arsip (*Archive*)
4. Interaksi (*Interactivity*)
5. Simulasi sosial (*Simulation of society*)
6. Konten oleh pengguna (*User-generated content*)

Media sosial dibagi ke dalam kategori-kategori untuk menentukan jenis media sosial itu. Nasrullah (2017:39) menjelaskan jenis-jenis media sosial adalah :

1. Media Jejaring sosial (*social networking*).

Jaringan sosial adalah medium yang paling populer dalam kategori media sosial. Contohnya adalah *facebook*, merupakan media sosial yang digunakan untuk memublikasikan konten seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna: juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial siber.

2. Jurnal *Online* (*blog*).

Media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Kehadiran *blog* telah membawa medium pemberitaan yang bersaing dengan media massa pada umumnya. Jenis media sosial ini dibagi dua: pertama, kategori *personal homepages*, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti *.com* atau *.net*, kedua,

dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman *Weblog* gratis seperti *Wordpress* atau *Blogspot*.

3. Jurnal *Online* sederhana atau mikroblog (*micro-blogging*).

Perbedaannya dengan blog ialah *micro-blogging* adalah ruang maksimal 140 karakter. Contohnya adalah *twitter*, dimana pengguna bisa menyebarkan informasi, mempromosikan pendapat, membahas isu terhangat (*trending topic*) dan menjadi bagian dari isu tersebut (*tweet*) menggunakan tagar (*hastag*) tertentu.

4. Media berbagi (*media sharing*).

Jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (*file*), video, audio, gambar dan sebagainya. Contohnya ialah *Youtube*, *Flickr*, *Photobucket*, atau *Snapfish*.

5. Penanda sosial (*social bookmarking*).

Media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *online*. Beberapa situs *social bookmarking* yang populer adalah *Delicious.com*, *StumbleUpon.com*, *Digg.com*, *Reddit.com*, dan untuk di Indonesia ada *LintasMe*.

6. Media konten bersama atau *Wiki*.

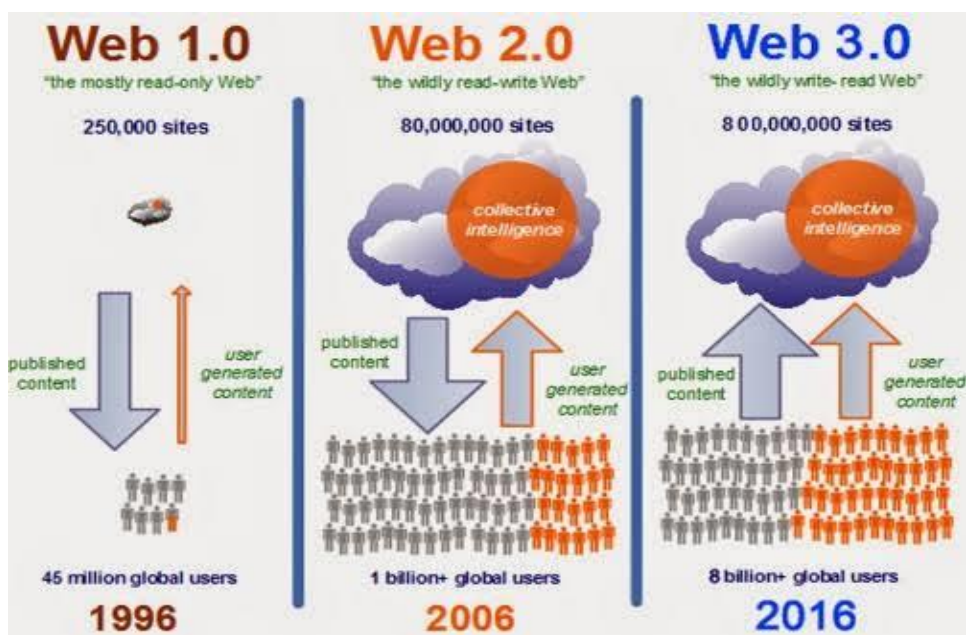
Media sosial yang memungkinkan penggunaanya berkolaborasi untuk membangun konten secara bersama.

Media sosial sering juga disebut sebagai media baru dengan keunggulan dapat digunakan secara langsung tanpa melalui organisasi media yang sulit. Mc Quail (dalam Kurnia, 2005:294) mengatakan dimana kebanyakan media baru

ini memungkinkan komunikasi dua arah yang bersifat interaktif yang memungkinkan pengumpulan sekaligus pengiriman informasi sehingga implikasinya bisa beragam.

Media sosial juga mendukung demokrasi *digital* karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan opininya, terlebih lagi dalam media sosial tidak berlaku hirarki struktur lapisan masyarakat yang ada pada dunia *offline*. Kekuatan media sosial ini terletak pada kemampuan setiap penggunanya untuk menyampaikan aspirasinya dengan efisien dan ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demchak (dalam Utomo, 2013:68) mengatakan:

“Melalui website, warga dan pemangku kepentingan pemerintahan bekerja, bagaimana prosedur mengakses layanan dari pemerintah, dan bahkan bagaimana aturan main untuk turut mempengaruhi atau menentukan sebuah kebijakan dan peraturan yang berpengaruh bagi kehidupan warga. Manifestasi dari *website 2.0* adalah media jejaring sosial (*social media networking*).”



Sumber: Heryanto (2018:31)

**Gambar 6. Perbedaan Struktur dan Komunikasi Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0**

Berdasarkan gambar 6, *Web 2.0* sebagai manifestasi dari media sosial merupakan perkembangan dari *Web 1.0*. Heryanto (2018:30) mendeskripsikan web sebagai seperangkat protokol dan standar-standar yang digunakan untuk mengakses informasi yang tersedia di internet, medium fisiknya digunakan untuk memindahkan data. Secara singkat *web* mengalami perkembangan dari *Web 1.0 (human cognition)* seluruh konten yang menghiasi *web* itu sepenuhnya berada di tangan admin dengan sedikit sekali interaksi. Selanjutnya, *Web 2.0 (human communication)* memungkinkan para pencipta konten berinteraksi dengan pengguna lainnya. Sedangkan *Web 3.0 (human cooperation)* adanya relasi yang terjadi terlihat dari manusia bekerja sama.

	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
Communication	Broadcast	Interactive	Engaged / Invested
Information	Static / Read-only	Dynamic	Portable & Personal
Focus	Organization	Community	Individual
Personal	Home Pages	Blogs / Wikis	Lifestreams
Content	Ownership	Sharing	Curation
Interaction	Web Forms	Web Applications	Smart Applications
Search	Directories	Keywords / Tags	Context / Relevance
Metrics	Page Views	Cost Per Click	User Engagement
Advertising	Banners	Interactive	Behavioral
Research	Britannica Online	Wikipedia	The Semantic Web
Technologies	HTML / FTP	Flash / Java / XML	RDF / RDFS / OWL

Sumber: Heryanto (2018:32)

### Gambar 7. Perbandingan antara *Web 1.0*, *Web 2.0*, dan *Web 3.0*

Berdasarkan gambar 7 tersebut, *Web 1.0* sebagai generasi pertama tampilannya statis sehingga pengunjung website hanya bisa membaca konten yang ada. Sedangkan, *Web 2.0* dibuat lebih interaktif sesama pengguna, maka sering disebut sebagai cikal bakal media sosial, dan yang terakhir *Web 3.0* dibuat lebih dinamis dan memungkinkan antar aplikasi bisa terhubung.

Perkembangan media sosial ini membawa banyak kemudahan, terlepas dari segala kemudahan hal ini juga membawa ancaman baru yaitu adanya informasi *hoax*.

Kemampuan setiap individu membuat konten memudahkan informasi *hoax* menyebar secara masif. Mursalin Barsah (dalam Waidah, 2019:325) menyebutkan informasi *hoax* biasanya selalu masuk akal dan menyentuh sisi emosional, sehingga orang yang menerima berita tersebut tidak sadar sedang dibohongi. Bahkan menganggap dengan mudah bahwa berita tersebut adalah fakta dan harus disampaikan kepada orang lain yang dianggap membutuhkan.

#### **D. Perubahan Kebijakan**

Kebijakan dalam aktivitas pemerintah merupakan bukti eksistensi suatu pemerintahan. Dye (dalam Wahab, 2016:14) menyatakan kebijakan publik ialah “*whatever governments choose to do or not to do*” yang artinya pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Pengertian tersebut masih terlalu luas, selanjutnya Anderson (dalam Islamy, 2003:17) mendefinisikan kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Kebijakan memiliki beberapa tahapan. Kraft dan Furlong (dalam Nugroho, 2014:368) menjelaskan tahapan-tahapan kebijakan, yaitu:

**Tabel 2. Tahapan Kebijakan**

<i>No.</i>	<i>Stage Of The Process</i>	<i>What It Means</i>
1.	<i>Agenda setting</i>	<i>How problem are received and defined, command attention, and get onto the political agenda.</i>
2.	<i>Policy formulation</i>	<i>The design and drafting of policy goals and strategies for achieving them Often involves the use of policy analysis.</i>
3.	<i>Policy legitimation</i>	<i>The mobilization of political support and formal enactment of policies. Includes justification or rationales for policy action.</i>
4.	<i>Policy implementation</i>	<i>Provision of institutional resources for putting the programs into effect within a bureaucracy.</i>
5.	<i>Policy and program evaluation</i>	<i>Measurement and assesment of policy and program effect, including success of failure.</i>
6.	<i>Policy change</i>	<i>Modification of policy goals and means in light of a new information or shifting political environment.</i>

Sumber: Kraft dan Furlong (dalam Nugroho, 2014:368)

Berdasarkan Tabel 2, tentang Tahapan Kebijakan, pengertian dari tahapan *agenda setting* adalah bagaimana masalah diterima dan didefinisikan, perhatian pemerintah, dan masuk ke agenda politik. Tahapan formulasi kebijakan adalah desain dan perumusan tujuan kebijakan dan strategi untuk mencapainya sering melibatkan penggunaan analisis kebijakan. Tahapan pengesahan kebijakan adalah mobilisasi dukungan politik dan pemberlakuan kebijakan secara formal termasuk pembenaran atau alasan untuk tindakan kebijakan.

Tahapan implementasi kebijakan adalah penyediaan sumber daya kelembagaan untuk menempatkan program berlaku dalam birokrasi. Tahapan evaluasi program dan kebijakan adalah pengukuran dan penilaian kebijakan dan efek program, termasuk keberhasilan kegagalan. Tahapan perubahan kebijakan adalah modifikasi tujuan dan sarana kebijakan dalam terang informasi baru atau perubahan lingkungan politik.



Adanya perubahan kebijakan atau revisi kebijakan karena terjadi pergeseran sasaran dan tujuan dalam kebijakan setelah dilakukannya evaluasi. Dunn (1999:608) menyatakan evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Berarti hasil kebijakan mempunyai nilai, karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran dari kebijakan.

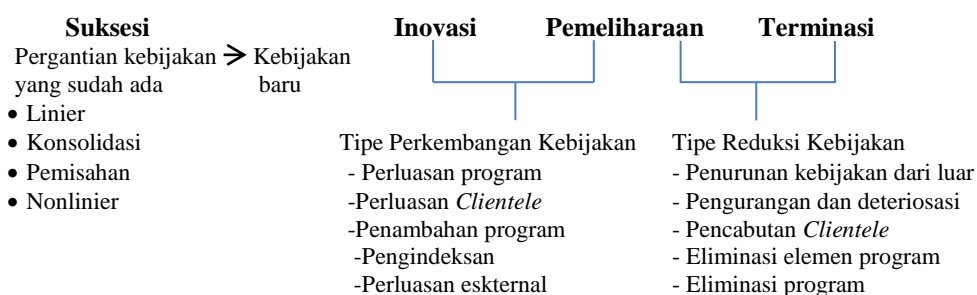
Perubahan dalam kebijakan jarang bisa dimasukkan dalam “evaluasi” rasional. Menurut Parsons (2005:572) untuk memeriksa dimensi perubahan kebijakan ini kita harus menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan siklus kebijakan

Pendekatan siklus kebijakan menjelaskan secara samar-samar tentang tahap penutup dari kebijakan. Setelah “evaluasi”, muncul umpan balik, kemudian diikuti dengan adaptasi dan terminasi (penghentian). Hogwood dan Peters (dalam Parsons, 2005:574) menyebutkan memahami variasi perubahan kebijakan dalam term tipe perubahan berikut ini:

- a. Inovasi kebijakan: Kebijakan “baru” kemungkinan akan diletakkan dalam kerangka yang ada dalam konteks kebijakan terkait yang sudah ada.
- b. Sukses kebijakan: Perubahan ini tidak menimbulkan perubahan fundamental melainkan melanjutkan perubahan yang sudah ada.
- c. Pemeliharaan kebijakan: Adaptasi atau penyesuaian untuk menjag agar kebijakan tetap berada dalam “jalurnya”.
- d. Terminasi kebijakan: Sebuah kebijakan akan dihentikan, “dikurangi”, dan pengeluaran publik pada kebijakan itu akan dipotong.

Kemungkinan besar yang akan terjadi adalah dalam konteks suksesi kebijakan. Suksesi dan inovasi adalah respons yang melibatkan usaha untuk membuat perubahan secara sengaja. Akan tetapi, suksesi adalah usaha pembuat kebijakan untuk mempertahankan kontinuitas dalam cara dan tujuan sebuah kebijakan, dan melakukan inovasi dan tujuan atau tatanan organisasional untuk mengamankan upaya ini.



Sumber: Parsons (2005:575)

**Gambar 8. Model Perubahan Kebijakan Hogwood dan Peters**

## 2. Pendekatan Organisasional

Perubahan kebijakan merupakan konsekuensi dari perubahan organisasional, atau mungkin perubahan organisasional itu sendiri merupakan perubahan dalam organisasi, melalui suksesi, inovasi, pemeliharaan, atau terminasi. Child (dalam Parsons, 2005:585) menyebutkan perubahan dalam organisasi ialah sebuah proses yang pada dasarnya bersifat politis di mana batasan dan kesempatan adalah fungsi dari kekuasaan yang dijalankan oleh pembuat keputusan berdasarkan nilai-nilai ideologis.

## 3. Perubahan kebijakan dan pembelajaran kebijakan

Terminasi, suksesi, pemeliharaan, dan suksesi adalah konsep yang maknanya akan bervariasi berdasarkan sistem nilai atau keyakinan yang

berbeda-beda. Sabatier dan Jenkins (dalam Parsons, 2005:594) menyatakan bahwa kunci untuk memahami perubahan kebijakan adalah dinamika keyakinan dan pembelajaran, pembelajaran yang berorientasi kebijakan melibatkan perubahan-perubahan pemikiran dan perilaku secara terus-menerus. Perubahan ini disebabkan oleh pengalaman dan terkait dengan pencapaian atau revisi pemahaman keyakinan tertentu.

Berbicara tentang perubahan kebijakan tidak terlepas dari sebuah terminasi kebijakan. Brewer (dalam Keban, 2015:799) menandakan bahwa terminasi merupakan upaya penyesuaian (*adjustment*) kebijakan yang dianggap disfungsi, *redundant*, *outmoded*, atau *unnecessary*. Terminasi kebijakan merupakan sebagai sebuah langkah penting untuk melakukan koreksi terhadap sebuah kebijakan yang ada, serta untuk mengalokasikan risorsis secara lebih efisien. Keban (2015:799) menjelaskan tujuan terminasi kebijakan adalah untuk merubah kebijakan atau program yang disfungsi atau *outmoded* dan memudahkan pencapaian sasaran kebijakan.

#### **E. Implikasi**

Implikasi atau dampak ialah konsekuensi dari sesuatu yang telah dilakukan. Kusumanegara (2010:134) mengatakan dampak dikonsentrasikan pada fenomena ekonomi dan yang paling besar perhatiannya adalah pada penggunaan pengukuran di tingkat individual, dan masyarakat (kolektif) yang diagregasikan dari tingkat individual. Islamy dan Ripley (dalam Kusumanegara, 2010:134) mengatakan ada empat dimensi utama dari dampak yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Waktu.

Secara alamiah, semakin lama periode post initiator (periode setelah permulaan adanya dampak) dipelajari, semakin sulit untuk mengukur dampak karena rantai kausalitas semakin kabur dan sejumlah pengaruh dari faktor-faktor lain yang akan dijelaskan akan semakin bertambah banyak dengan cepat.

2. Hubungan dampak aktual dengan bakal dampak.

Analisis dampak memerlukan perhatian tidak sekedar pada derajat pencapaian program dan apa yang bakal dicapai, tetapi juga pada akibat apa yang akan terjadi jika program hanya tercapai sebagian atau bahkan tidak tercapai sama sekali.

3. Tingkat agregasi dampak.

Dampak suatu program terhadap individu dapat dipelajari, dan dampak tingkat individual ini dapat diagregasikan, di rata-rata, dan dianalisis dengan berbagai cara untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada unit yang lebih luas dari individu. Masyarakat adalah subyek dari dampak itu sendiri.

4. Tipe-tipe dampak.

Ada empat tipe utama dampak dari program-program domestik, yaitu:

1. Dampak pada kehidupan domestik.
2. Dampak pada proses pembuatan keputusan.
3. Dampak pada sikap-sikap publik seperti dukungan pada sistem politik.
4. Dampak pada kualitas kehidupan.

## **F. Kerangka Pikir**

Fenomena pembangunan kembali Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim bertujuan agar PKOR Wayhalim dapat kembali sebagaimana fungsinya. Selain itu, dibangunnya beberapa fasilitas baru juga menunjang PKOR Way Halim menjadi ruang publik dan ruang terbuka hijau di Provinsi Lampung.

Revitalisasi PKOR Way Halim dilakukan karena adanya aspirasi dari masyarakat yang disampaikan di media sosial, bahwasannya PKOR Way Halim tidak berfungsi sebagaimana mestinya (disfungsi). Aspirasi masyarakat di media sosial tersebut menjadi masukan bagi pemerintah dan mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti dengan melakukan beberapa tindakan sebagai upaya merevitalisasi PKOR Way Halim. Sabardi (2014:73) menyatakan peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan.

Untuk dapat mengetahui peran masyarakat di media sosial dan implikasinya terhadap kebijakan revitalisasi PKOR Way Halim tersebut, perlu dilihat dari kategori peran masyarakat menurut Waluyo (dalam Sabardi, 2014:73), sebagai berikut:

### **a. Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan.**

Masyarakat sekitar PKOR Way Halim atau yang menggantungkan hidupnya di PKOR Way Halim dan terkena dampak akibat adanya pembangunan lalu menyampaikan aspirasinya di media sosial, memiliki hak untuk dikonsultasikan oleh pemerintah.

b. Peran serta masyarakat sebagai strategi.

Aspirasi masyarakat di media sosial ditindaklanjuti pemerintah agar tindakan pemerintah merevitalisasi PKOR Way Halim mendapat dukungan dan tidak terjadi penolakan di masyarakat.

c. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi.

Aspirasi masyarakat di sosial media didayagunakan pemerintah sebagai masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

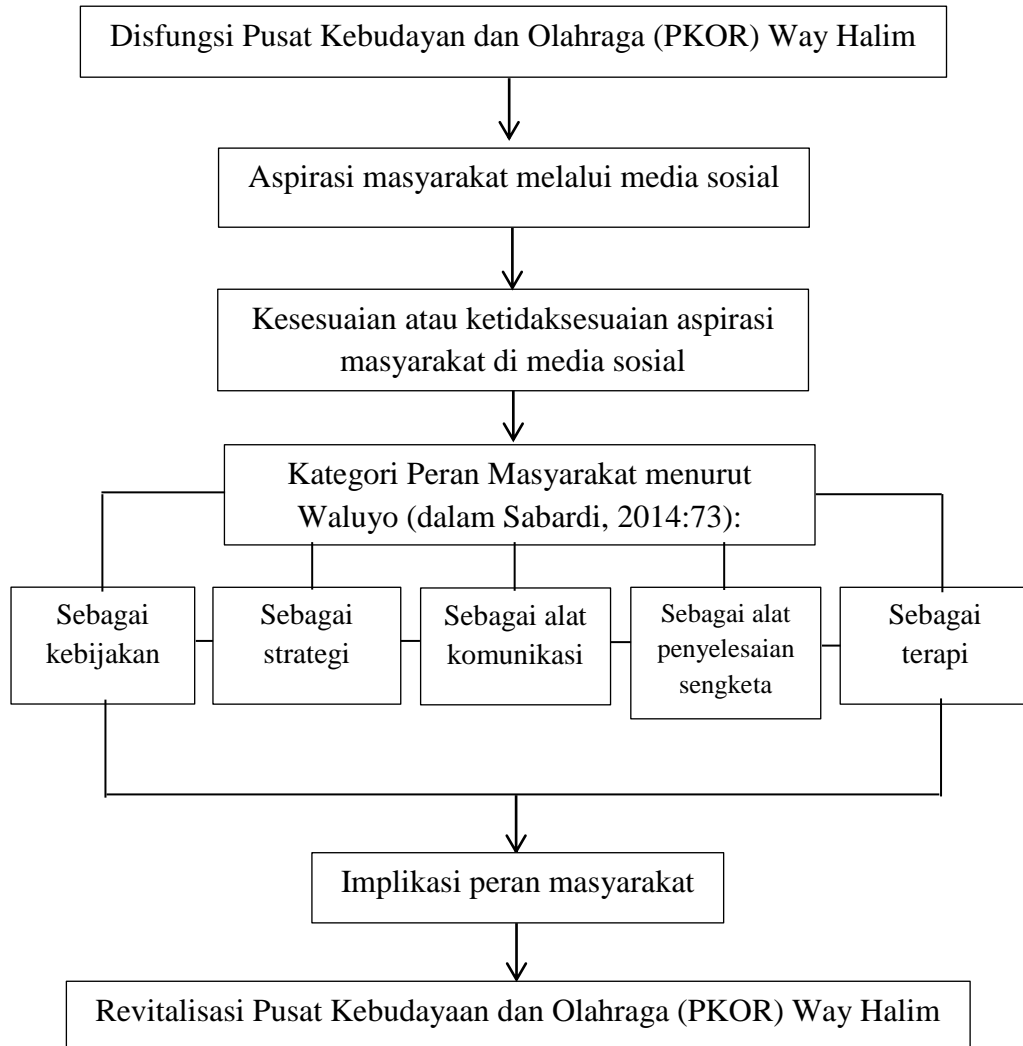
d. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa.

Aspirasi masyarakat di media sosial dijadikan pemerintah sebagai sarana untuk bertukar pikiran dan pandangan dengan masyarakat agar meningkatkan pengertian dan toleransi antara pemerintah dan masyarakat.

e. Peran serta masyarakat sebagai terapi.

Aspirasi masyarakat di sosial media membuat masyarakat menghilangkan rasa ketidakberdayaannya dan merasa bahwa mereka termasuk ke dalam komponen penting pada proses pengambilan keputusan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 9. Alur Kerangka Pikir**

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian peran masyarakat melalui media sosial dan implikasinya terhadap revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif. Rahmat (2009:2) mengatakan penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Peneliti menggunakan tipe kualitatif karena dirasa sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai peran masyarakat melalui media sosial dan implikasinya terhadap kebijakan revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim, ditinjau dari kategori peran masyarakat yang sesuai pada aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media sosial terkait PKOR Way Halim.



## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berguna untuk membatasi suatu penelitian agar peneliti tidak melakukan penelitian keluar dari batas tujuan awalnya. Moleong (2001:237) tujuan dari penentuan fokus penelitian yaitu, pertama penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-ekslusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai peran masyarakat melalui media sosial, relevansi konten aspirasi masyarakat di media sosial dan implikasinya terhadap kebijakan revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim, peran masyarakat melalui media sosial ditinjau dari kategori peran masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. kategori peran masyarakat menurut Waluyo (dalam Sabardi, 2014:73), sebagai berikut:

- a. Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan.

Aspirasi masyarakat di media sosial mendorong pemerintah agar melakukan konsultasi dengan masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat yang terkena dampak dari revitalisasi PKOR Way Halim.

- b. Peran serta masyarakat sebagai strategi.

Aspirasi masyarakat di media sosial ditindaklanjuti pemerintah agar tindakan pemerintah merevitalisasi PKOR Way Halim mendapat dukungan dan tidak terjadi penolakan di masyarakat.

- c. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi.

Aspirasi masyarakat di media sosial didayagunakan pemerintah sebagai masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

d. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaain sengketa.

Aspirasi masyarakat di media sosial dijadikan pemerintah sebagai sarana untuk bertukar pikiran dan pandangan dengan masyarakat agar meningkatkan pengertian dan toleransi antara pemerintah dan masyarakat.

e. Peran serta masyarakat sebagai terapi.

Aspirasi masyarakat di sosial media membuat masyarakat menghilangkan rasa ketidakberdayaannya dan merasa bahwa mereka termasuk ke dalam komponen penting pada proses pengambilan keputusan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian disesuaikan dengan hal-hal yang menjadi fokus penelitian dan mencegah terjadinya penelitian yang terlalu luas. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang akurat. Lokasi dalam penelitian ini terletak di Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Wayhalim, dan juga wilayah kerja pemerintahan Provinsi Lampung untuk melengkapi informasi penelitian dengan mengambil lokus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung dan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

#### D. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Moleong (2001:165) menjelaskan *purposive sample* bertujuan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Peneliti menggunakan *purposive sample* karena informan dari penelitian ini dinilai memiliki kriteria tertentu yaitu yang mengetahui, memahami dan berkaitan langsung dengan kebijakan revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) sebagai berikut:

1. Pemerintah

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) karena BAPPEDA Provinsi Lampung yang memiliki wewenang dalam penyusunan rencana pembangunan, pengordinasian kelancaran dan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan revitalisasi PKOR Way Halim dan Kepala Seksi Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Dinas Cipta Karya dan PSDA Provinsi Lampung karena dinas yang melaksanakan pembangunan dalam revitalisasi PKOR Way Halim.

2. Masyarakat

- a. Media sosial *instagram* masyarakat Lampung yaitu pemilik akun *instagram* Lampung Geh atas *username* @lampung dengan *followers* 351.000 dan 10.200 postingan<sup>7</sup>, dengan *tagline* “media online punya masyarakat lampung” karena akun ini turut aktif dalam mempublikasikan budaya Lampung, prestasi masyarakat Lampung,

---

<sup>7</sup> Diakses pada tanggal 18 April 2019 pukul 17:55

isu-isu di Lampung, pariwisata Lampung, pembangunan-pembangunan di Provinsi Lampung termasuk mengawasi pembangunan PKOR Way Halim melalui media sosial.

- b. Media sosial *instagram* masyarakat Lampung yaitu pemilik akun *Sky Scraper City Lampung* atas *username @sscilampung* dengan *followers* 28.600 dan 1.370 postingan<sup>8</sup>, dengan *tagline* “media online perkembangan kontruksi, infrastruktur, tata kota dan wilayah Lampung” karena akun ini aktif dalam menyoroti pembangunan di Provinsi Lampung termasuk dengan memberikan kritik dan saran dalam proses revitalisasi PKOR Way Halim melalui media sosial.
3. Perusahaan berita di media sosial

Perusahaan media sosial lokal yang menyajikan berita melalui media sosial karena berperan menyampaikan aspirasi masyarakat sekitar PKOR Way Halim dan ikut mengawasi pembangunan PKOR Way Halim yaitu, Saibumi.com dengan *tagline* tercepat dan terpercaya, Saibumi.com mengusung misi menjadi rujukan informasi utama mengenai Lampung bagi para pengambil kebijakan, pebisnis, kalangan profesional, dan khalayak luas.

**Tabel 3. Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan
1.	Silvi Arisanti, S.STP., M.H.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Lampung.
2.	Hanjar Safari, SP, M.Eng	Kepala Bidang Konservasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya Provinsi Lampung.
3.	Friday Friendly	Staff Bidang Pembangunan dan

<sup>8</sup> Diakses pada tanggal 18 April 2019 pukul 18:19

		Pemeliharaan Bangunan Dinas Cipta Karya dan PSDA Provinsi Lampung.
4.	Bery	Masyarakat pemilik akun <i>instagram</i> Lampung Geh dengan <i>username @lampuung</i> .
5.	Evando	Masyarakat pemilik akun <i>instagram</i> <i>Sky Scraper City</i> Lampung dengan <i>username @sscilampung</i>
6.	Ruslan Fiqri, S.H., M.H.	Pemimpin Redaksi PT. Saibumi Media Utama (Saibumi.com).

Sumber: Hasil Penelitian,2019

## E. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Menurut Sarwono (2006:209) data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui informan yang dijadikan sebagai sample penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini menentukan informan-informan yang menguasai permasalahan dalam penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan diperoleh dari berbagai arsip dan dokumen. Menurut Sarwono (2006:209) data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, serta data dari media sosial yaitu *google*, dan *instagram*.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi interaksional tanya jawab antara dua orang dan secara tatap muka yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada informan atau narasumber terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara kepada informan yang dilakukan pada waktu yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Wawancara Informan**

No.	Nama	Jabatan	Waktu
1.	Silvi Arisanti, S.STP., M.H.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Lampung.	Jumat, 22 Maret 2019 pukul 13:34 WIB
2.	Hanjar Safari	Kepala Bidang Konservasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya Provinsi Lampung.	Senin, 25 Maret 2019 pukul 13.30
3.	Friday Friendly	Staff Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Dinas Cipta Karya dan PSDA Provinsi Lampung.	Senin, 25 Maret 2019 pukul 10:39
4.	Bery	Masyarakat pemilik akun <i>instagram</i> Lampung Geh dengan <i>username @lampuung</i> .	Sabtu, 23 Maret 2019 pukul 16:47
5.	Evando	Masyarakat pemilik akun <i>instagram Sky Scrapper City</i> Lampung dengan <i>username @sscilampung</i>	Selasa, 16 April 2019 pukul 13:22
6.	Ruslan Fiqri, S.H., M.H.	Pemimpin Redaksi PT. Saibumi Media Utama (Saibumi.com).	Rabu, 27 Maret 2019 pukul 14:18

Sumber: Hasil Penelitian,2019

## 2. Observasi

Observasi dibutuhkan untuk menunjang data primer. Ratcliff (dalam Rahmat, 2009:7) menyatakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.

### a. Observasi partisipasi

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

### b. Observasi tidak terstruktur

Observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pada observasi ini peneliti harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

### c. Observasi kelompok

Observasi yang dilakukan secara berkelompok sekaligus.

Penelitian ini melakukan observasi tidak terstruktur dengan mengamati objek secara langsung. Observasi juga diperlukan dalam mengamati hal-hal yang tidak didapatkan dalam wawancara. Dalam observasi ke lapangan peneliti secara langsung mendatangi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim mengamati perubahan hasil dari revitalisasi PKOR Way Halim dan mendokumentasikannya. Dalam melakukan observasi, peneliti juga mencocokkan informasi yang telah didapat dengan informan setelah dilakukan wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh berdasarkan informasi dan dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan maupun fakta yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, serta dari sumber media sosial *google*, dan *instagram*.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung, Dinas Cipta Karya Provinsi Lampung, serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini, melalui peraturan dan kebijakan atau peraturan terkait, transkrip wawancara, dan foto-foto dokumentasi terkait objek yang diteliti.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Editing Data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Tahap ini, data yang tidak bernilai atau tidak relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama pemerintah (Kepala Dinas Cipta



Karya dan PSDA Provinsi Lampung dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung), masyarakat (masyarakat yang turut aktif mengawasi pembangunan PKOR Wayhalim melalui media sosial, yaitu pemilik akun *instagram* atas *user* @sscilampung dan @lampuung), perusahaan berita di media sosial (perusahaan berita di media sosial atau sering disebut berita *online*, yang berperan menyampaikan aspirasi masyarakat sekitar PKOR Wayhalim dan ikut mengawasi pembangunan PKOR Wayhalim yaitu saibumi.com.).

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi.

## 2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif.

Pada proses ini, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan. Hasil wawancara yang telah memiliki makna akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.

## **H. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Reduksi data**

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang didapat di lapangan. Peneliti mengumpulkan data mengenai revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR).

### **2. Penyajian data**

Penyajian data adalah kumpulan data yang diperoleh yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data yang di peroleh dari penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti akan menyajikan data yang telah direduksi.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

## **I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data merupakan teknik untuk mengecek validitas data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan selanjutnya dilakukan uji kredibilitas untuk mendapatkan keabsahannya. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan keselarasan antara data yang didapatkan di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara diperkuat oleh data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Moleong (2001:178) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak dengan masyarakat dan perusahaan berita yang menyampaikan aspirasinya di media sosial kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan data-data yang didapat melalui studi dokumentasi. Langkah berikutnya adalah peneliti mengkonfirmasi kebenaran data dengan cara melakukan observasi di lapangan guna memperoleh kecocokan dengan data lain. Data lain yang dimaksud adalah keterangan dari informan penelitian di lapangan yang meliputi keterangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung dan Dinas Cipta Karya Provinsi Lampung. (Matrik Triangulasi terlampir)

Melalui Triangulasi sumber maka diperoleh informasi yang valid dan jelas mengenai peran masyarakat melalui media sosial dan implikasinya terhadap kebijakan revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga Way Halim. Melalui

hasil triangulasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai.

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Masyarakat Provinsi Lampung**

Provinsi Lampung secara geografis terletak di timur-barat berada antara  $103^{\circ} 40'$ - $105^{\circ} 50'$  Bujur Timur, Utara-Selatan berada antara:  $6^{\circ} 45'$ - $3^{\circ} 45'$  Lintang Selatan. Provinsi Lampung dibagi dalam beberapa wilayah administratif Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Kabupaten Lampung Barat
2. Kabupaten Tanggamus
3. Kabupaten Lampung Selatan
4. Kabupaten Lampung Timur
5. Kabupaten Lampung Tengah
6. Kabupaten Lampung Utara
7. Kabupaten Way Kanan
8. Kabupaten Tulang Bawang
9. Kabupaten Pesawaran
10. Kabupaten Pringsewu
11. Kabupaten Mesuji
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat
13. Kabupaten Pesisir Barat
14. Kota Bandar Lampung

## 15. Kota Metro

Semboyan Provinsi Lampung adalah Sai Bumi Ruwa Jurai artinya satu bumi dua jiwa, yang dimaksudkan sebagai masyarakat Provinsi Lampung dibagi dalam dua suku yaitu suku Lampung Pesisir dan Suku Lampung Pepadun. Adapun jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan kelompok umur menurut Badan Pusat Statistik Lampung Tahun 2015, sebagai berikut:

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2015**

Kelompok Umur (1)	Jenis Kelamin		
	Laki- Laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
	0-4	419.035	400.553
5-9	391.994	371.589	763.583
10-14	377.218	357.804	735.022
15-19	373.058	350.682	723.740
20-24	360.166	339.042	699.208
25-29	349.280	330.866	680.146
30-34	340.244	329.360	669.604
35-39	330.026	314.334	644.360
40-44	292.347	277.533	569.880
45-49	249.768	239.768	489.536
50-54	209.302	197.282	406.584
55-59	164.544	144.925	309.469
60-64	114.025	101.205	215.230
65+	191.430	199.888	391.318
<b>Jumlah</b>	<b>4.162.437</b>	<b>3.954.831</b>	<b>8.117.268</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung 2010-2035, BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 5, Jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 8.117.268 jiwa. Dari total penduduk tersebut Provinsi Lampung memiliki angkatan kerja dengan tingkat kelulusan sebagai berikut:

**Tabel 6. Kelompok Umur Angkatan Kerja dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015**

Kelompok Umur (AK)	2015					
	Angkatan Kerja Menurut Klp Umur dan Pendidikan (Jiwa)					
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD	Sekolah Dasar	SLTP	SMTA	Diploma I/II/III, Universitas
15-19	91	7 004	39 293	76 589	73 436	0
20-24	143	9 080	71 865	130 800	209 233	32 982
25-29	0	21 596	103 610	155 265	143 574	49 261
30-34	447	26 328	124 121	130 058	144 863	35 321
35-39	1 229	43 649	160 658	128 263	123 840	32 324
40-44	3 268	48 479	162 877	105 648	102 845	30 769
45-49	2 875	65 775	135 145	71 797	96 067	29 668
50-54	10 087	97 160	122 483	34 881	40 727	22 500
55-59	4 286	79 725	94 575	29 504	23 445	13 825
60+	30 569	127 419	124 089	27 504	13 694	5 499

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 6, kelompok umur 15-19 tahun di dominasi oleh pendidikan SLTP. Kelompok umur usia 20-24 tahun di dominasi oleh pendidikan SMTA. Kelompok umur 25-29 di dominasi oleh pendidikan SLTP. Kelompok umur 30-34 di dominasi oleh pendidikan SMTA. Kelompok umur 35-39 di dominasi oleh pendidikan Sekolah Dasar. Kelompok umur 40-44 di dominasi oleh pendidikan Sekolah Dasar. Kelompok umur 45-49 di dominasi pendidikan Sekolah Dasar. Kelompok umur 50-54 di dominasi pendidikan Sekolah Dasar. Kelompok umur 55-59 di dominasi pendidikan Sekolah dasar dan kelompok umur mulai dari 60 tahun ke atas di dominasi oleh pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar.

Penduduk Provinsi Lampung memiliki rata-rata pendapatan, sebagai berikut:

**Tabel 7. Pendapatan Perkapita Provinsi Lampung Tahun 2015 (Rupiah)**

Wilayah	PDRB Perkapita ADHK 2010 (Rupiah)
	2015
Lampung Barat	13 948 733
Tanggamus	15 525 671
Lampung Selatan	25 349 795
Lampung Timur	24 932 145
Lampung Tengah	31 292 006
Lampung Utara	22 205 934
Way Kanan	18 092 261
Tulang Bawang	29 827 876
Pesawaran	21 971 872
Pringsewu	16 430 958
Mesuji	29 213 990
Tulang Bawang Barat	24 063 892
Pesisir Barat	16 818 258
Bandar Lampung	31 526 570
Metro	21 803 196
Provinsi Lampung	24 581 682

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, menyatakan pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata penduduk di Provinsi Lampung ialah sebesar Rp. 24.581.682.

## **B. Kebijakan Revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim**

Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim adalah suatu kawasan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang diperuntukkan sebagai tempat melakukan kegiatan budaya dan olahraga terbesar di Provinsi Lampung. Mengingat di area seluas kurang lebih 20 hektar ini terdapat stadion sepakbola



Sumpah Pemuda, lapangan dan mess panahan, anjungan rumah adat Kota/Kabupaten di Lampung, hingga sekretariat Dewan Kesenian Lampung. Kegiatan ini berlangsung secara temporer, dimana pemanfaatan stadion dan gedung olahraga dilakukan pada saat *event* tertentu yang membutuhkan sarana tersebut.

Kawasan ini akrab bagi semua kalangan, setiap harinya juga digunakan masyarakat sebagai tempat *refreshing*, *jogging*, atau bahkan untuk sekedar berwisata kuliner. Berbagai kegiatan besar juga dilakukan di PKOR Way Halim seperti Lampung Fair yang menggunakan seluruh lahan PKOR dalam pelaksanaannya. Kawasan PKOR secara administratif terletak di Kelurahan Perumnas Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, terletak pada sisi poros utama jalur (Jalan Sultan Agung) yang menghubungkan antara jalan arteri primer (Jalan Soekarno Hatta) dengan Jalan ZA Pagar Alam – Teuku Umar.



**Gambar 10. Peta lokasi PKOR Way Halim**

Pemanfaatan lain dari kawasan ini adalah untuk area penghijauan kota. Pada kawasan ini juga terdapat hutan kota yang terletak di sisi Barat berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta. Taman Hutan Kota Way Halim ini juga dilengkapi dengan embung/kolam resapan dan fasilitas perdagangan/kuliner dan sentra batu akik disebelahnya.

PKOR Way Halim sejak awal dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, akibatnya banyak fasilitas yang ada justru menjadi terabaikan hingga akhirnya rusak. Hal tersebut menyebabkan kawasan PKOR menjadi tidak berdaya hidup (*unlivable*). Kondisi tidak berdaya hidupnya kawasan ini diperparah dengan hadirnya pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan ruang-ruang terabaikan di kawasan ini sebagai tempat berdagang.

Respon masyarakat yang baik terhadap PKL sayangnya menyebabkan perkembangan kegiatan PKL tidak terkendali. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, karena kegiatan komersial justru merusak atau menutup fungsi fasilitas olahraga dan budaya serta aktifitas komersial belum di dukung dengan sarana dan prasarana memadai. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan PKOR Way Halim menjadi ruang publik yang tidak berdaya hidup (*unlivable*) karena pengunjung tidak merasa nyaman dan aman saat mengunjungi kawasan ini. Jika dibiarkan terus menerus kondisi ini akan berdampak luas pada menurunnya kualitas kehidupan masyarakat dan citra kota. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini secara khusus dirumuskan sebagai berikut :

1. Tidak terintegrasinya antar kegiatan yang berkembang di kawasan.
2. Terjadi konflik antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor.
3. Menurunnya kualitas lingkungan kawasan.
4. Tidak tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sesuai dengan perkembangan kegiatan komersial.

Tujuan Pemerintah Provinsi Lampung merevitalisasi PKOR Way Halim, sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan penataan pemanfaatan ruang agar kegiatan menjadi saling berintegrasi
2. Merancang fasilitas pejalan kaki dan menata sistem sirkulasi.
3. Merancang sistem prasarana dasar yang baik, diantaranya : jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan pembuangan limbah cair maupun limbah padat (sampah).
4. Merancang penataan lingkungan kawasan untuk meningkatkan daya tarik.
5. Merancang pola fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sesuai untuk berbagai kegiatan rekreasi.
6. Mengoptimalkan prinsip keindahan, kenyamanan, keamanan dari sebuah design kawasan Olahraga yang terintegrasi dengan peruntukan kawasan lainnya.

Berbagai fasilitas olahraga telah tersedia karena revitalisasi di PKOR Way Halim seperti *jogging track*, *skate park*, panjat tebing, stadion, lapangan *softball*, dan lainnya untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Selain itu,

untuk kegiatan seni telah disiapkan gedung untuk kegiatan seni. Masyarakat juga tidak perlu khawatir untuk masalah keamanan karena PKOR Way Halim dijaga oleh satpol PP yang bertugas untuk menjaga keamanan para pengunjung dan menghindari pungutan liar.

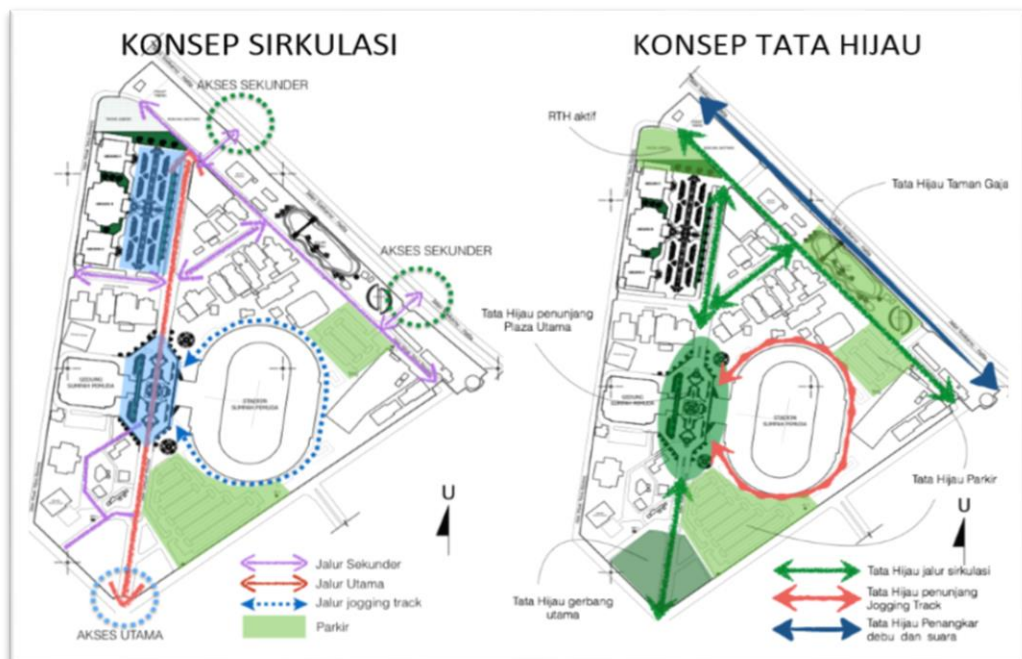
Adapun pengelompokan zona panduan penataan yaitu terdiri dari :

1. Zona entrance dan parkir I
2. Zona seni dan budaya
3. Zona olahraga indoor dan perkantoran
4. Zona plaza utama dan koridor
5. Zona anjungan
6. Zona stadion
7. Zona taman, kuliner dan olahraga permainan
8. Zona parkir II dan lapangan tembak



Sumber: Data konsep zonasi PKOR Way Halim Dinas Cipta Karya Provinsi Lampung

**Gambar 11. Konsep Zonasi PKOR Way Halim**



Sumber: Data simulasi penataan PKOR Way Halim Dinas Cipta Karya Provinsi Lampung

**Gambar 12. Konsep sirkulasi dan tata hijau PKOR Way Halim**



Sumber: Data simulasi penataan PKOR Way Halim Dinas Cipta Karya Provinsi Lampung



Sumber: Data simulasi penataan PKOR Way Halim Dinas Cipta Karya Provinsi Lampung

**Gambar 13. Simulasi penataan PKOR Way Halim**

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyiapkan bangunan pendukung untuk membuat masyarakat atau pengunjung lebih nyaman. Bangunan tersebut diantaranya adalah pagar yang membuat hilir masuk pengunjung lebih tertata dan mengurangi resiko kejahatan, beberapa bangunan MCK, tempat duduk menyerupai halte, taman-taman kecil, dan masjid agar pengunjung lebih nyaman.

Visi penataan kawasan PKOR Way Halim yaitu teras kota yang ikonik, nyaman, rekreatif dan terpadu. Kawasan perencanaan PKOR Way Halim akan menjadi wajah kota sesuai dengan visinya yaitu teras kota, terkait peran dan posisi spasialnya. Oleh karena itu, skenario pengembangan yang dilakukan yaitu :

a. Peningkatan aksesibilitas kawasan.

Lingkungan kawasan yang baik akan tercipta dengan adanya sistem keterkaitan seperti jaringan jalan, pedestrian, angkutan umum dan jaringan pendukungnya yang tertata baik dan terintegrasi

b. Peningkatan ragam aktivitas dalam kawasan.

Dalam kegiatan revitalisasi PKOR Way Halim ini diperlukan penambahan ragam kegiatan seni budaya dan olahraga sehingga dapat meningkatkan dan mengukuhkan peran PKOR sebagai ruang publik kota yang berkarakter dan signifikan.

c. Penciptaan kenyamanan dan image kawasan

Kenyamanan ini juga mencakup keselamatan dan keamanan bagi pengunjung kawasan, baik yang berkendara maupun yang berjalan

(pedestrian). Kenyamanan meliputi pembentukan kenyamanan mikro dan ruang-ruang komunal yang memadai.

d. Pembentukan fungsi dan aktivitas penunjang.

Sebagai kawasan dengan fungsi kegiatan seni, budaya dan olahraga dalam konteks kawasan sekitar sebagai kawasan perdagangan dan jasa, maka karakter komersial akan mendominasi lingkungan di sekitar kawasan serta akan mendorong munculnya aktivitas pendukung yang harus mampu melayani kegiatan baik di dalam PKOR maupun diluar. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan fungsi penunjang seperti fungsi wisata kuliner yang akan memberikan keterkaitan dengan lingkungan sekitarnya.

e. Perwujudan dimensi sosial dan budaya kawasan.

Penataan kawasan yang lebih inklusif, terbuka dan memberikan ruang untuk beraktivitas bagi publik. Dimensi sosial juga dapat diwujudkan dengan menyediakan ruang UMKM sebagai wisata kuliner serta event-event tertentu pada ruang terbukanya dengan melibatkan masyarakat luas.

f. Perhatian terhadap mitigasi bencana.

Sebagaimana arahan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung, kawasan PKOR selain berfungsi sebagai kawasan seni budaya dan olahraga, juga dapat difungsikan sebagai plaza/ruang untuk evakuasi bencana. Hal ini berarti peran PKOR sebagai ruang publik semakin kuat bagi kepentingan masyarakat kota.



## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

1. Peran serta masyarakat terhadap revitalisasi PKOR Way Halim di media sosial memenuhi empat dari lima kategori peran masyarakat yaitu; sebagai kebijakan, sebagai strategi, sebagai alat komunikasi dan sebagai alat penyelesaian sengketa, namun tidak berperan sebagai alat terapi. Berikut ini penjelasannya:
  - a) Aspirasi masyarakat terkait tuntutan dan dukungan saat revitalisasi berperan sebagai suatu kebijakan karena mendorong pemerintah untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dari revitalisasi PKOR Way Halim.
  - b) Aspirasi masyarakat terkait disfungsi berperan sebagai strategi karena pemerintah menindaklanjuti aspirasi masyarakat di media sosial agar mendapat dukungan masyarakat dalam revitalisasi PKOR Way Halim.
  - c) Aspirasi masyarakat terkait disfungsi serta tuntutan dan dukungan saat revitalisasi berperan sebagai alat komunikasi karena mampu memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah.
  - d) Aspirasi masyarakat terkait tuntutan dan dukungan saat revitalisasi berperan sebagai alat penyelesaian sengketa karena aspirasi

masyarakat dijadikan pemerintah sebagai sarana bertukar pikiran, mentoleransi keluhan masyarakat, dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pelaksanaan revitalisasi PKOR Way Halim.

e) Aspirasi masyarakat di media sosial tidak berperan sebagai terapi karena pemerintah menindaklanjuti aspirasi masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan menindaklanjuti semata-mata untuk “mengobati” rasa ketidakberdayaan masyarakat yang merasa bukan komponen penting dalam masyarakat.

2. Aspirasi masyarakat yang disampaikan di media sosial cenderung mengikuti perkembangan teknologi, sebelum revitalisasi aspirasi masyarakat cenderung disampaikan melalui situs atau *Web* yang kebanyakan diakses melalui aplikasi *google+*, saat revitalisasi aspirasi masyarakat cenderung menggunakan aplikasi *instagram*. Aspirasi masyarakat tersebut disampaikan tidak hanya oleh generasi *millennial* akan tetapi dari pihak swasta yang bergerak di bidang berita *online* juga turut menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bukan informasi *hoax*.
3. Aspirasi masyarakat melalui media sosial sebelum revitalisasi berimplikasi pada substansi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung merevitalisasi PKOR Way Halim. Sedangkan, aspirasi masyarakat melalui media sosial

saat revitalisasi berlangsung berimplikasi pada pelaksanaan teknis dari revitalisasi PKOR Way Halim.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan terkait peran masyarakat di media sosial dan implikasinya terhadap kebijakan revitalisasi Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim, sebagai berikut:

1. Masyarakat menyampaikan aspirasi melalui media sosial sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada mampu mempengaruhi substansi dari kebijakan pemerintah. Peran serta masyarakat ini sudah cukup baik, dan perlu ditingkatkan lagi eksistensinya dalam menyampaikan aspirasi agar kebijakan pemerintah selanjutnya dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah yang dirasakan oleh masyarakat.
2. Pemerintah Provinsi Lampung sudah membuat keputusan berdasarkan aspirasi masyarakat di media sosial, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi daya serap terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan di media sosial dalam pembuatan *masterplan* agar seluruh masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan dapat diselesaikan dengan baik.
3. Perusahaan berita *online* di media sosial diharapkan dapat terus menyampaikan aspirasi masyarakat di media sosial agar aspirasi masyarakat tersebut dapat sampai kepada para pembuat kebijakan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Dunn, N. William. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Heryanto, Gun Gun. 2018. *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta : IRCiSoD.
- Hasan, Erliana. 2014. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kusumanegara , S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung
- Ngalimun. 2017. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru Press.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Prenada Media.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahab, Abdul Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

#### **Sumber Skripsi :**

Andrianto, Rioferi. 2013. *Pemerintah dan Social Media (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Social Media sebagai Media Komunikasi oleh Humas Pemerintah Kabupaten Tabalong)*. Skripsi. Universitas Muhammdiyah Surakarta.

Pradiptaya, Aditya. 2017. *Media Sosial Dalam Aktivitas Humas Pemerintah (Studi Deskriptif Pengelolaan Media Sosial oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai Media Komunikasi Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*.Skripsi. Universitas Gadjah Mada.

Prasetya, Dimas. 2016. *Respon Masyarakat Terhadap Balap Liar Dikalangan Remaja (Studi Di Pkor Way Halim Bandar Lampung)*. Skripsi. Universitas Lampung.

Yohan, Benny. 2016. *Analisis Potensi Usaha Kecil Dan Menengah Di Pusat Kebudayaan Dan Olah Raga Way Halim Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung.

Yunita, Reni. 2016. *Penataan Kawasan Pusat Kebudayaan Dan Olahraga Way Halim Bandar Lampung Dengan Konsep Livable Public Space*.Skripsi. Universitas Gadjah Mada.

#### **Sumber Jurnal :**

Andriana, Nina. 2013. *Media Siber Sebagai Alternatif Jembatan Komunikasi Antara Rakyat Dan Pemimpinnya*. Dalam Jurnal Penelitian Politik. Vol.10. No. 2. Hlm. 79-93

Drakel, Wahyuni Januarti, Maria Heni Pratiknjo dan Titiek Mulianti. 2018. *Perilaku Mahasiswa Dalam Menggunakan Media Sosial Di Universitas Sam Ratulangi Manado*. Dalam HOLISTIK. Tahun XI No. 21A. Hlm. 1-20

Giantika, Gan Gan. 2019. *Pemanfaatan Blog Pribadi di Instagram Sebagai Media Komunikasi Parenting (Studi Deskriptif Kualitatif Akun Instagram @annisast)*. Dalam jurnal Komunikasi. Vol.10. No. 1. Hlm. 1-9

Keban, Philipus.2011. *Terminasi Kebijakan Publik: Tinjauan Normatif*. Dalam Jejaring Administrasi Publik. Vol.7. No. 2. Hlm. 799-803

- Kurnia, Novi. 2005. *Perkembangan Teknologi dan Dunia Baru: Implikasi Terhadap Teori Komunikasi*. Dalam Jurnal Meditor. Vol.6. No.2. Hlm. 291-296
- Kurniawan, Drajat Edy. 2017. *Pengaruh Intensitas Bermain Game Online Terhadap Perilaku Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Universitas Pgris Yogyakarta*. Dalam Konseling GUSJIGANG Vol. 3 No. 1 Hlm. 97-103
- Lestaluhu, Said. 2015. *Peran Media Cetak Dalam Mengawal Kebijakan Publik Di Kota Ambon*. Dalam Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol.19. No.1. Hlm. 01-15
- Munandar, Haris dan Maman Suherman. 2016. *Aktivitas Komunikasi Pemerintahan Ridwan Kamil di Media Sosial*. Dalam Jurnal Hubungan Masyarakat. Vol.2. No. 1. Hlm. 423-429
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Dalam Jurnal EQUILIBRIUM. Vol.5. No.9. Hlm. 01-08
- Sabardi, Lalu. 2014. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Dalam Yustisia. Vol.3. No.1. Hlm. 67-79
- Sihabudin, Budi. 2017. *Peran Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja Di CV. Triona Multi Industri*. Dalam Jurnal Kajian dan Administrasi Pemerintah Daerah. Vol.11. No.6. Hlm. 95-114
- Utomo, Puguh Prasetyo. 2013. *Website Sebagai Media Pemenuhan Hak Politik Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Dalam Mandatory. Vol.10. No.2. Hlm. 59-88
- Walidah, Iftah Al. 2017. *Tabayyun Di Era Generasi Millenial*. Dalam jurnal LIVING HADIS. Vol.2. No.6. Hlm. 317-344
- Yovinus. 2018. *Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung*. Dalam Jurnal Academia Praja. Vol.1. No.1. Hlm. 185-211

**Sumber Internet :**

<http://digilib.unila.ac.id/21734/> diakses pada 30 November 2018 pukul 21:25 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/23175/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018 pukul 16:05 WIB.

[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=105084&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=105084&obyek_id=4) diakses pada tanggal 01 Oktober 2018 pukul 15:59 WIB.

<http://lampungprov.go.id/berita/gubernur-ridho-pkor-tumpuan-peningkatan-prestasi-para-atlet-di-lampung.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pada pukul 23:13 WIB.

<https://lampung.antaranews.com/berita/294139/lbh-kecam-pengusuran-pedagang-pkor-wayhalim> diakses pada tanggal 01 Oktober pukul 17:03 WIB.

<http://lampung.tribunnews.com/2015/11/30/banyak-kafe-remang-di-pkor-way-halim-bikin-resah> diakses pada tanggal 30 November 2018 pukul 21:00 WIB.

<http://lampung.tribunnews.com/2016/03/30/video-stadion-pkor-kini-tidak-terawat-dan-memprihatinkan> diakses pada tanggal 30 November pukul 21:47 WIB.

<http://lampung.tribunnews.com/2016/05/13/bapol-pp-diminta-tertibkan-pedagang-di-pkor> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 20:02 WIB.

<http://lampung.tribunnews.com/amp/2017/03/15/omset-jeblok-pkl-pkor-ogah-tempati-lahan-baru> diakses pada tanggal 09 September 2018 pukul 19:30 WIB.

<http://lampung.tribunnews.com/amp/2017/04/03/kawasan-pusat-kegiatan-olahraga-jadi-tempat-mesum-saksi-yang-wanita-tak-pakai-celana?page=3> diakses pada tanggal 09 September 2018 pukul 20:35 WIB.

<http://lampung.tribunnews.com/2018/06/30/tertibkan-pkl-di-sepanjang-jalan-luar-pkor-way-halim> diakses pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 21:00 WIB.

<http://lampung.tribunnews.com/2018/07/03/walhi-desak-dinas-bertanggungjawab-angkut-sampah-di-areal-pkor> diakses pada 01 Oktober 2018 pukul 19:30 WIB.

<http://lampung.tribunnews.com/2018/08/09/oknum-lakukan-pungli-di-pkor-way-halim-bikin-resah> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 21:16 WIB.

<http://lampung.tribunnews.com/2018/09/17/rth-tak-terurus-area-skateboard-pkor-tergenang-sampah-mengambang-di-taman-tugu-juang> diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 21:00 WIB.

<http://lampung.tribunnews.com/2018/10/07/bikin-macet-pkl-di-depan-pkor-dikeluhkan-warga> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 22:20 WIB.

<http://setkab.go.id/paradigma-baru-komunikasi-pemerintah-di-era-digital/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pada pukul 18:11 WIB.

[https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/laporan%20survei%20APJII\\_2011.3.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/laporan%20survei%20APJII_2011.3.pdf), diakses pada tanggal 30 September 2018 pukul 13.40 WIB.

[https://www.academia.edu/33888527/Laporan\\_Observasi\\_Pasar\\_Tiban\\_Di\\_PKO\\_R\\_Wayhalim\\_Bandar\\_Lampung.docx](https://www.academia.edu/33888527/Laporan_Observasi_Pasar_Tiban_Di_PKO_R_Wayhalim_Bandar_Lampung.docx), diakses pada tanggal 30 November 2018 pukul 22:20 WIB.

<https://www.detiklampung.com/berita-9160-ridho-revitalisasi-pkor-ini-semoga-bermanfaat.html>, diakses pada tanggal 04 Oktober pada pukul 07:03 WIB.

<https://www.infokyai.com/2018/04/hebat-walau-sudah-tua-kakek-ini-tetap-semangat-cari-uang.html> diakses pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 19:00 WIB.

[https://www.instagram.com/p/Ba6uNQQgOow/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=25m3jjznwhhj](https://www.instagram.com/p/Ba6uNQQgOow/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=25m3jjznwhhj) diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 22:30 WIB.

[https://www.instagram.com/p/BenWbF8BWqi/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=v8rsj9p9urho](https://www.instagram.com/p/BenWbF8BWqi/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=v8rsj9p9urho) diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 22:00 WIB.

[https://www.instagram.com/p/BiL36rGgt8t/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=11rvu0a1bor2u](https://www.instagram.com/p/BiL36rGgt8t/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=11rvu0a1bor2u) diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 23:13 WIB.

<https://www.kupastuntas.co/2017/07/pkl-boleh-berdagang-lagi-di-pkor-bandar-lampung-tapi-ada-syarat-yang-harus-dipenuhi/> diakses pada tanggal 11 / 2018 pukul 21:00 WIB.

<https://www.kupastuntas.co/2018/02/revitalisasi-pkor-way-halim-bukti-gubernur-ridho-berhasil-wujudkan-rth-di-kota-bandar-lampung/> diakses pada tanggal 11 September 2018 pada pukul 17:11 WIB.



<https://www.saibumi.com/artikel-57763-pkor-way-halim-bandar-lampung-yang-multifungsi-bagi-masyarakat.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 pukul 20:10 WIB.

<https://www.youtube.com/watch?v=C2cPOGfIbC0> diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 20:00 WIB.

<https://www.youtube.com/watch?v=mwuX07fnr1c> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 20:00 WIB.

<https://www.youtube.com/watch?v=WFLuKsVa0B0> diakses pada 09 September 2018 pukul 20:15 WIB.

<https://www.detiklampung.com/berita-1386-pkor-way-halim-jadi-arena-mesum.html> diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 14:55

<http://contoh-irul.blogspot.com/2014/04/tiap-malam-pkor-way-halim-disulap-jadi.html?m=1> diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 15:15

<https://issu.com/ayep3/docs/150814/30?ff> diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 22:17

<https://www.saibumi.com/artikel-66087-warga-keluhkan-pungutan-di-lapangan-tanah-pkor-wayhalim.html> diakses pada 11 Februari 2019 pukul 22:38

<https://www.saibumi.com/artikel-67253-kempo-lampung-menatap-pon-dengan-fasilitas-memprihatinkan.html> diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 22:48

<https://google.co.id/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2015/2014/mohon-dicek-warung-kopi-di-way-halim-jadi-tempat-mangkal-psk> diakses pada 11 Februari 2019 pukul 23:01

<https://www.google.co.id/amp/duajurai.co/2016/04/27/jejak-jejak-mesum-waria-di-bandar-lampung-dari-lapangan-saburai-hingga-kolam-pemancingan-pkor/amp/> diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pukul 23:10

<http://www.harianpilar.com/2016/01/14/istri-pun-protes/> (diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 00:40

[https://www.instagram.com/p/Bb4Wy0gXAo/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=q78k3b7u26oi](https://www.instagram.com/p/Bb4Wy0gXAo/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=q78k3b7u26oi) diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 00:49

[https://www.instagram.com/p/BdfM89FhjYr/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=v8dmots0fdqf](https://www.instagram.com/p/BdfM89FhjYr/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=v8dmots0fdqf) diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 01:09

[https://www.instagram.com/p/BeuEuRFGde/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=wxkvc5rjiki3](https://www.instagram.com/p/BeuEuRFGde/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=wxkvc5rjiki3) diakses pada 29 maret 2019 pukul 23:59

[https://www.instagram.com/p/BfALUBDIRKk/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=dzv7ein3ngxq](https://www.instagram.com/p/BfALUBDIRKk/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=dzv7ein3ngxq) diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 01:23

[http://www.instagram.com/p/BfBO\\_4k4HZr/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet\\_&igshid=1t6v23675gtrb](http://www.instagram.com/p/BfBO_4k4HZr/?utm_source=ig_share_sheet_&igshid=1t6v23675gtrb) diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 01:28

[https://www.instagram.com/p/BepRZ9ArHp/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=pox3oyxigu9z](https://www.instagram.com/p/BepRZ9ArHp/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=pox3oyxigu9z) diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 01:17

<https://www.saibumi.com/artikel-79320-direlokasi-pedagangpkorwayhalimminta-dialog-dengan-pemprov-lampung.html> diakses pada 17 Februari 2019 pukul 09:15

<https://www.google..co.id/amp/duajurai.co/2016/09/05pemprovlampungdimintadi-alog-soal-relokasi-pkl-pkor-way-halim/amp/> diakses pada 17 Februari 2019 pukul 09:22

<https://www.google.co.id/amp/www.lampost.co/amp/pkor-antara-pedagang-dan-ruang-publik> diakses pada 17 Februari 2019 pukul 09:32

[http://issuu.com/lampungpost0/docs/lampung\\_post\\_jumat\\_31\\_maret\\_2017\\_/6/ff](http://issuu.com/lampungpost0/docs/lampung_post_jumat_31_maret_2017_/6/ff) diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 00:49

<https://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&i=40346> diakses pada 17 Februari 2019 pukul 09:48

[https://www.instagram.com/p/BiL36rGgt/?utm\\_source=ig\\_share\\_sheet&igshid=1ax5slnny9gi](https://www.instagram.com/p/BiL36rGgt/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1ax5slnny9gi) diakses pada 20 Maret pukul 10:19

### **Lain-Lain :**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.

Hasil Survey APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018.